



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026



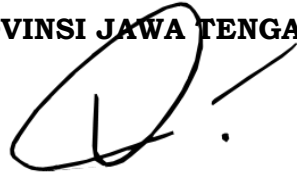
**DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian indikator kinerja program kegiatan, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, serta mendukung pencapaian, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Semarang, Juni 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 00 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini disusun dengan optimal bahwa Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra termasuk perubahannya bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, kami berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah dan merumuskan program yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Renstra Perangkat Daerah disusun secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan pikiran. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

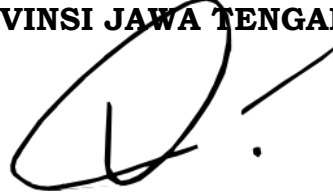
Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renstra ini dapat selesai disusun. Renstra ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Renstra ini akan dipedomani oleh seluruh personil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Tekad ini akan terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara kuantitatif akan terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Pentingnya peningkatan kapasitas semua unsur di internal, agar target capaian dalam Renstra dan RPD Tahun 2024-2026 yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai dengan optimal.

Semoga rintisan awal perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada, akan menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 00 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Uraian Tugas	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)	14
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	65
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	68
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	68
3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	72
3.3 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Tahun 2020 – 2024.....	76
3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	83
4.1 Tujuan dan Sasaran	83
4.2 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah	86
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	91
5.1 Strategi	91
5.2 Arah Kebijakan	91
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	95
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	134
BAB VIII PENUTUP	137
8.1 Catatan Penting	137
8.2 Kaidah Pelaksanaan	137

8.3	Rencana Tindak Lanjut	138
-----	-----------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1
Gambar 2.1	Stuktur Organisasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	10
Gambar 2.2	Grafik IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022	33
Gambar 2.3	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/ Kota, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2022	35
Gambar 2.4	Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2022	37
Gambar 2.5	Grafik IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022	38
Gambar 2.6	Grafik Capaian KLA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2022	39
Gambar 2.7	Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022	40
Gambar 2.8	Grafik Capaian Indeks Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022	42
Gambar 2.9	Grafik Capaian CPR di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022.....	43
Gambar 2.10	Grafik Capaian MKJP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022	44
Gambar 2.11	Grafik Capaian Unmetneed di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022.....	45
Gambar 2.12	Grafik Capaian BKB, BKR, BKL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022.....	46
Gambar 2.13	Grafik Capaian UPPKA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022	47
Gambar 2.14	Grafik Capaian ASFR di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2022	48
Gambar 2.15	Grafik Jumlah Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Per Februari 2023	50
Gambar 3.1	Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	15
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	20
Tabel 2.5	Kesesuaian Antara Kinerja dengan Target Program Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	30
Table 2.6	Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018-2022.....	33
Tabel 2.7	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten / Kota, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	34
Tabel 2.8	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten / Kota, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022..	36
Tabel 2.9	Data IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022	38
Tabel 2.10	Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kategori Tingkat Pratama, Tingkat Madya, Tingkat Nindya Dan Tingkat Utama Di Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	39
Tabel 2.11	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017-2022	40
Tabel 2.12	Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022	42
Tabel 2.13	Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022	43
Tabel 2.14	Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2022	44
Tabel 2.15	Unmetneed KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022	45
Tabel 2.16	Keaktifan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) Tahun 2020 – 2022	46
Tabel 2.17	Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) Tahun 2020 – 2022	47

Tabel 2.18	Data ASFR 15-19 Tahun Dari Tahun 2017-2021	48
Tabel 2.19	Data Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Per Februari 2023	49
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	52
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	69
Tabel 3.2	Target Indikator Daerah Tahun 2024 – 2026	74
Tabel 3.3	Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026	74
Tabel 3.4	Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 – 2024	77
Tabel 3.5	Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024	81
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 – 2026	84
Tabel 4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 – 2026	87
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	93
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026	100
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	135
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD	135

BAB I PENDAHULUAN

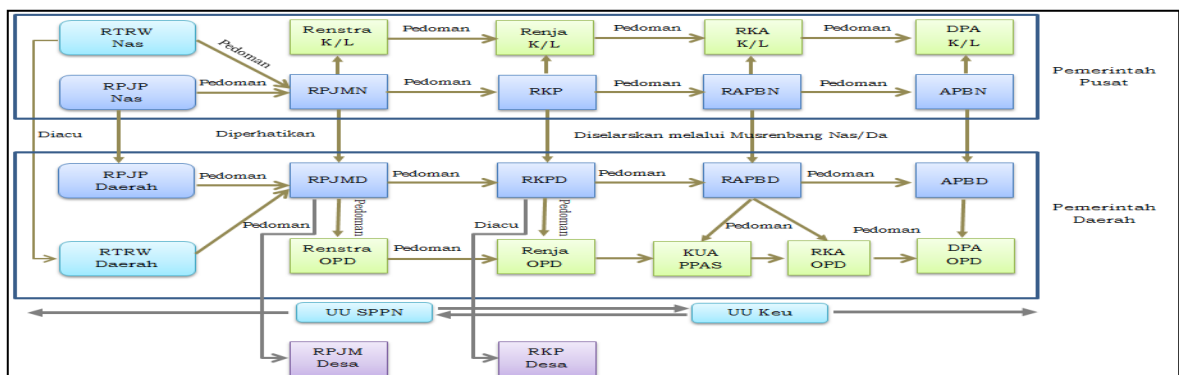
1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan; (3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik; (5) Fasilitasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Renstra BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) baik yang ada di Pusat maupun Perwakilan Jawa Tengah.

Keterkaitan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya. Selain itu dokumen Renstra dapat dijadikan pedoman dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 28. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
 31. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-12/2018) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (16-286/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-93/2022) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi

- Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
 48. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
 49. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
 50. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 34);
 51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);
 52. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah penampungan Sementara bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);
 53. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 33);

54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24).
56. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
57. Surat Edaran Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 Dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

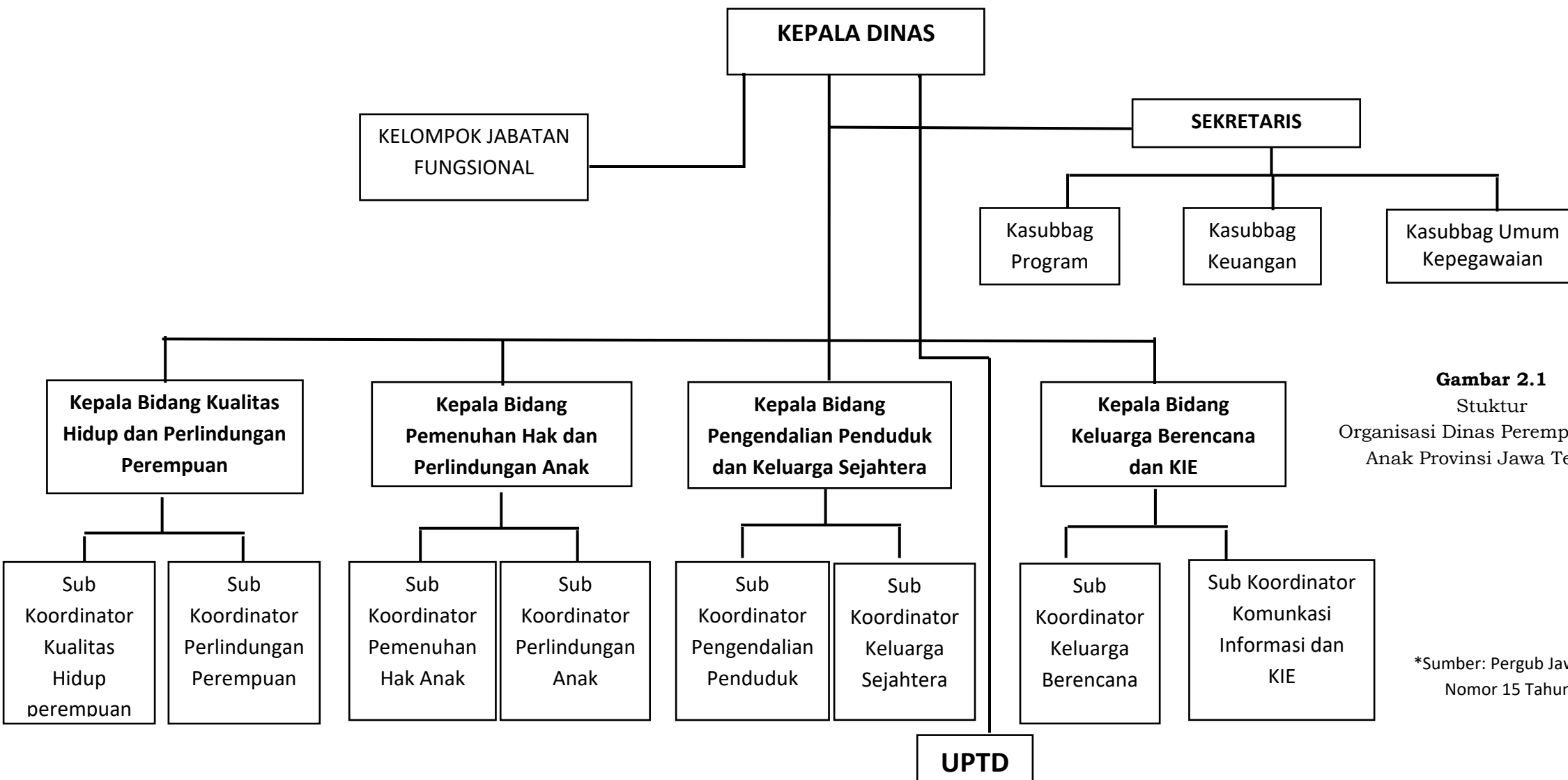
2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Program;
 - b. Sub bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahi:
 - a. Sub fungsi Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Sub fungsi Perlindungan Perempuan.
4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - a. Sub fungsi Perlindungan Anak;
 - b. Sub fungsi Pemenuhan Hak Anak.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - a. Sub fungsi Pengendalian Penduduk;
 - b. Sub fungsi Keluarga Sejahtera.
6. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, membawahkan :
 - a. Sub fungsi Keluarga Berencana;
 - b. Sub fungsi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - a. Tata Usaha
 - b. Pengaduan
 - c. Tindak Lanjut
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar 2.1
 Stuktur
 Organisasi Dinas Perempuan dan
 Anak Provinsi Jawa Tengah

*Sumber: Pergub Jawa Tengah
 Nomor 15 Tahun 2023

2.1.2. Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan

- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak, melaksanakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penjangkauan korban;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
 - d. Pelaksanaan penampungan sementara;
 - e. Pelaksanaan mediasi;
 - f. Pelaksanaan pendampingan korban;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan di lingkungan UPTD; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	-	-	-	1	-	1	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	2	-	2	2
3	SMA Sederajat	3	-	3	20	3	23	26
4	D1	1	-	1	-	-	-	1
5	D3	-	4	4	-	-	-	4
6	DIV	-	2	2	-	2	2	4
7	S1	6	19	25	11	8	19	44
8	S2	3	23	26	-	1	1	27
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	48	61	34	14	48	109

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 109 orang, terdiri dari PNS sebanyak 61 orang dan Non PNS sebanyak 48 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan banyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 44 orang (41,2%), kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 27 orang (26,04%) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26 orang (24,7%). Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Sementara itu jika dilihat jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terbagi atas golongan II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 42 orang dan golongan IV sebanyak 13 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	2	6
3	Golongan III	7	35	42
4	Golongan IV	1	12	13
Jumlah		12	49	61

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagian besar dalam kondisi baik, meskipun demikian jika dilihat dari kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masih diperlukan dukungan pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor seperti sarana prasarana komputer sesuai standarisasi. Kondisi beberapa sarana dan prasarana kerja memerlukan pembaharuan mengingat beberapa peralatan kerja telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar sehingga perlu pembenahan dan penambahan kapasitas ruangan.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana pada pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak juga masih diperlukan, mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat antara lain penyediaan ruang pelayanan, gedung layanan, meubelair, peralatan kantor. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang optimal.

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	1	-	1
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	1
II	Peralatan dan Mesin			

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Alat-Alat Besar	11	-	11
	Potable Generating Set	1	-	1
	Stationary Generating Set	1	-	1
	Lain-lain	3	-	3
	Stationary Water Pump	6	-	6
2	Alat-Alat Angkut	24	-	24
	Sedan	1	-	1
	Jeep	1	-	1
	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	-	1
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	7	-	7
	Sepeda Motor	13	-	13
	Rescue Car	1	-	1
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	754	-	754
	Mesin Ketik Listrik	2	-	2
	Lemari Besi/Metal	41	-	41
	Filing Cabinet Besi	27	-	27
	Brandkas	1	-	1
	Lemari Kaca	2	-	2
	Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR. Filing Cabinet	17	-	17
	Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR. Rak Arsip	3	-	3
	White Board	6	-	6
	Mesin Absensi	4	-	4
	Alat Pemotong Kertas	2	-	2
	White Board Electronic	1	-	1
	LCD Projector/Infocus	2	-	2
	Papan Pengumuman	3	-	3
	Papan Tulis	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. LCD Proyektor	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Speaker	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Pompa Air Dabb	1	-	1
	Meja Kerja Kayu	10	-	10
	Kursi Besi/Metal	3	-	3
	Sice	17	-	17
	Meja Rapat	53	-	53
	Tempat Tidur Besi	3	-	3
	Tempat Tidur Kayu	2	-	2
	Meja Resepsionis	2	-	2
	Meja Tambahan	2	-	2
	Kursi Rapat	75	-	75
	Kursi Putar	93	-	93
	Meja Komputer	3	-	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Sofa	8	-	8
	Meubliair. Rak Kayu	1	-	1
	Meubliair. Meja Kayu/Rotan	14	-	14
	Meubliair. Tikar	1	-	1
	Meubliair. Lemari Pakaian	6	-	6
	Meubliair. Lemari Kayu	2	-	2
	Meubliai. Meja Kecil	1	-	1
	Mesin Penghisap Debu/Vaccum Cleaner	2	-	2
	Leari Es	5	-	5
	AC Sentral	9	-	9
	AC Split	16	-	16
	Kipas Angin	8	-	8
	Exhause Fan	4	-	4
	Televisi	10	-	10
	Amplifier	7	-	7
	Loudspeaker	19	-	19
	Sound System	4	-	4
	Wireless	7	-	7
	Microphone	2	-	2
	Mic Conference	1	-	1
	Unit Power Supply (UPS)	3	-	3
	Stabilisator	1	-	1
	Tustel	1	-	1
	Lambang Garuda Pancasila	1	-	1
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	-	1
	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use)	1	-	1
	Tangga Alumunium	3	-	3
	Dispenser	15	-	15
	Mimbar/Podium	2	-	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Cassete Recorder	2	-	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Kotak Saran	1	-	1
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Kotak Sound System	1	-	1
	Lain-lain	13	-	13
	Alat Pemadam/Portable	4	-	4
	Panel Pengontrol Kebakaran	1	-	1
	Hidran Kebakaran	1	-	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	-	4
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	122	-	122
	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	11
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	45	-	45
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	6	-	6
	Buffet Kayu	3	-	3
	Lemari dan Arsip Pejabat. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1	-	1
	Lemari dan Arsip Pejabat. Buffet Kaca	3	-	3
4	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	33	-	33
	Power Amplifier	1	-	1
	Chairman/audio Conference	1	-	1
	Peralatan Studio Visual. Camera + Attachment	2	-	2
	Peralatan Studio Visual. Proyektor + Attachment	2	-	2
	Lain-Lain	9	-	9
	Video Switcher	1	-	1
	Mixer Pvc	2	-	2
	Layar Film/Projector	1	-	1
	Camera Digital	1	-	1
	Lain-Lain	3	-	3
	Telephone (Pabx)	4	-	4
	Facsimile	3	-	3
	Alat Komunikasi Telephone. Handphone	1	-	1
	Lain-Lain	2	-	2
5	Alat Komputer	140	-	140
	P.C Unit	68	-	68
	Laptop	8	-	8
	Note Book	10	-	10
	Webcam	2	-	2
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	-	48
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	-	3
	Server	1	-	1
III	Bangunan dan Gedung			
1	Bangunan Gedung	3	-	3
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	-	1
	Rumah Negara Golongan III Tipe A	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Permanen			
2	Monument	3	-	3
	Tugu Peringatan Baleho	3	-	3
IV	Aset Tetap Lainnya			
1	Bahan Perpustakaan	732	-	732
	Referensi	14	-	14
	Ilmu Pengetahuan Umum	630	-	630
	Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi	1	-	1
	Umum. Buku. Perpustakaan	22	-	22
	Ilmu Jiwa	2	-	2
	Agama Islam	1	-	1
	Agama Hindu	1	-	1
	Hukum	50	-	50
	Pendidikan	1	-	1
	Pengetahuan Bahasa Indonesia	1	-	1
	Ilmu Kedokteran	1	-	1
	Ilmu Kerumah Tanggaan	6	-	6
	Management dan Perkantoran	1	-	1
	Sejarah	1	-	1
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4	-	4
	Alat Kesenian. Alat Musik/Band	1	-	1
	Lain-lain	3	-	3

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	Nilai				75,12	75,14	72,60	71,62	72,70	72,18	71,73	71,64	73,78	-	96,09	95,46	98,68	103,01	-
2	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%				82,86	85,71	100	91,43	100	91,43	91,43	100,00	100	-	110,34	106,67	100,00	109,37	-
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100.000				8,37	8,29	8,22	8,15	8,07	8,25	8,99	8,97	8,10	-	101,45	92,21	91,64	109,37	-
4	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%				34,18	34,21	34,24	N/A	N/A	34,28	34,31	34,29	N/A	N/A	100,29	100,29	100,15	N/A	N/A
5	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%				N/A	N/A	N/A	34,27	34,30	N/A	N/A	N/A	36,11	-	N/A	N/A	N/A	105,37	-
6	Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%				22,86	25,71	28,57	60,00	62,85	54,28	54,28	62,85	71,42	-	237,45	211,12	219,99	119,03	-
7	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%				N/A	N/A	N/A	80,00	90,00	N/A	N/A	N/A	80	-	N/A	N/A	N/A	87,5	-
8	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100,000				8,16	8,13	7,78	8,05	8,02	7,78	8,49	8,35	7,47	-	104,88	95,75	93,17	107,76	-
9	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	angka				2,26	2,24	2,30	2,20	2,19	2,23	2,23	2,09	2,15	-	101,36	100,45	110,04	102,33	-
10	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	angka				75,00	75,10	75,25	64,76	65,17	73,48	73,26	70,35	65,18	-	97,97	97,55	93,49	100,65	-
11	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%				21,64	21,14	21,14	N/A	N/A	22,00	22,25	21,99	N/A	N/A	101,66	105,25	104,02	N/A	N/A
12	Indeks pembangunan keluarga	indeks				N/A	N/A	N/A	54,38	56,29	N/A	N/A	-	58,16	-	N/A	N/A	N/A	106,95	-
13	Nilai Kepuasan Masyarakat	nilai				70	74	77	80,00	85,00	80,25	81,75	81,75	87,81	-	114,64	110,47	106,17	109,76	-
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai				78,50	78,52	78,54	79,05	79,10	84,23	84,60	87,50	86,99	-	107,30	107,74	111,41	110,04	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
15	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan yang menjadi pelaku ekonomi	%				25,00	30,00	30,00	N/A	N/A	30,00	30,00	30,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	-
16	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	per 100,000				N/A	N/A	N/A	6,42	6,84	N/A	N/A	N/A	7,9	-	N/A	N/A	N/A	123.05	-
17	Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	orang				30	25	120	N/a	N/A	60	30	470	N/A	N/A	200,00	120,00	391,67	N/A	N/A
18	Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	orang				20.700	3.450	1.200	N/A	N/A	20.700	3.389	1.299	N/A	N/A	100,00	98,23	108,25	N/A	N/A
19	Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%				73,00	35,00	73,00	N/A	N/A	73,00	35,00	73,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
20	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	%				100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
21	Jumlah Forum Anak Provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	%				34,00	34,00	35,00	N/A	N/A	34,00	35,00	35,00	N/A	N/A	100,00	102,94	100,00	N/A	N/A
22	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	%				N/A	N/A	N/A	40,00	60,00	N/A	N/A	N/A	42,85	-	N/A	N/A	N/A	107.13	-
23	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	%				N/A	N/A	N/A	30,00	40,00	N/A	N/A	N/A	30	-	N/A	N/A	N/A	100.00	-
24	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%				N/A	N/A	N/A	35,00	40,00	N/A	N/A	N/A	63,88	-	N/A	N/A	N/A	182.51	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
25	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	%				N/A	N/A	N/A	40,00	50,00	N/A	N/A	N/A	100	-	N/A	N/A	N/A	250.00	-
26	Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	%				5,87	5,81	5,76	5,70	5,64	5,89	5,75	5,11	4,38	-	99.66	101.04	112.72	130.14	-
27	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%				N/A	N/A	N/A	15,00	20,00	N/A	N/A	N/A	20	-	N/A	N/A	N/A	133.33	-
28	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	%				1.007,00	997,00	987,00	N/A	N/A	1.024,00	980,00	937,00	N/A	N/A	101,69	98,29	94,93	N/A	N/A
29	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%				N/A	N/A	N/A	8,33	13,89	N/A	N/A	N/A	57,14	-	N/A	N/A	N/A	685.95	-
30	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Jumlah Lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	lembaga				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	-	100,00	200,00	100,00	100,00	-
32	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	lembaga				N/A	N/A	N/A	10,00	20,00	N/A	N/A	N/A	10	-	N/A	N/A	N/A	50,00	-
33	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%				N/A	N/A	N/A	35,00	40,00	N/A	N/A	N/A	63,88	-	N/A	N/A	N/A	182.51	-
34	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	%				N/A	N/A	N/A	42,85	48,57	N/A	N/A	N/A	42,85	-	N/A	N/A	N/A	100.00	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
35	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya	%				80,00	88,57	91,43	94,28	100,00	89,00	88,57	88,57	100	-	111,25	100,00	96,87	100,00	-
36	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%				N/A	N/A	N/A	20,00	25,00	N/A	N/A	N/A	30	-	N/A	N/A	N/A	100,00	-
37	Jumlah kabupaten/kota menuju layak anak Tingkat Pratama, tingkat Madya, Tingkat Nindya	kab/kota				28,00	29,00	35,00	N/A	N/A	31,00	31,00	35,00	N/A	N/A	110,71	106,90	100,00	N/A	N/A
38	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	%				100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
39	Jumlah Forum Anak Provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	lembaga				34,00	34,00	35,00	N/A	N/A	34,00	35,00	35,00	N/A	N/A	100,00	102,94	100,00	N/A	N/A
40	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	kab/kota				N/A	N/A	N/A	35,00	35,00	N/A	N/A	N/A	35,00	-	N/A	N/A	N/A	100,00	-
41	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	lembaga				N/A	N/A	N/A	10,00	15,00	N/A	N/A	N/A	10,00	-	N/A	N/A	N/A	100,00	-
42	Rasio korban kekerasan terhadap anak	rasio				12,76	12,66	12,44	12,46	12,36	12,44	12,15	11,02	10,33	-	102,57	104,20	112,89	120,62	-
43	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%				N/A	N/A	N/A	15,00	20,00	N/A	N/A	N/A	20	-	N/A	N/A	N/A	100,00	-
44	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	kasus				1.198,00	1.188,00	1.178,00	N/A	N/A	1.106,00	1.074,00	1.085,00	N/A	N/A	92,32	90,40	92,11	N/A	N/A
45	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	%				N/A	N/A	N/A	8,33	13,89	N/A	N/A	N/A	50	-	N/A	N/A	N/A	600,24	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
46	Jumlah Lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	lembaga				15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
47	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
48	Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	lembaga				N/A	N/A	N/A	-	10,00	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-
49	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	lembaga				N/A	N/A	N/A	10,00	15,00	N/A	N/A	N/A	10,00	-	N/A	N/A	N/A	100,00	-
50	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%				83,33	83,33	100,00	N/A	N/A	83,33	83,33	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
51	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%				N/A	N/A	N/A	15,00	20,00	N/A	N/A	N/A	20	-	N/A	N/A	N/A	133,33	-
52	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	kab/kota				N/A	N/A	N/A	5,00	7,00	N/A	N/A	N/A	5	-	N/A	N/A	N/A	100	-
53	Jumlah Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	lembaga				5,00	5,00	5,00	N/A	N/A	5,00	10,00	5,00	N/A	N/A	100,00	200,00	100,00	N/A	N/A
54	Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	lembaga				20,00	20,00	20,00	N/A	N/A	20,00	20,00	20,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
55	Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	lembaga				30,00	30,00	30,00	N/A	N/A	30,00	30,00	30,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
56	Jumlah Laporan data dan informasi PPA	laporan				5,00	5,00	6,00	N/A	N/A	5,00	5,00	6,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
57	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%				8,33	8,33	11,42	N/A	N/A	5,56	6,33	19,44	N/A	N/A	66,75	75,99	170,23	N/A	N/A
58	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%				N/A	N/A	N/A	19,44	27,70	N/A	N/A	N/A	44,44	-	N/A	N/A	N/A	228.60	-
59	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	dokumen				3,00	3,00	3,00	N/A	N/A	2,00	2,00	7,00	N/A	N/A	66,67	66,67	233,33	N/A	N/A
60	Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	sekolah				35,00	5,00	35,00	N/A	N/A	35,00	5,00	35,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
61	Jumlah Dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi	dokumen				2,00	1,00	2,00	N/A	N/A	2,00	1,00	5,00	N/A	N/A	100,00	100,00	250,00	N/A	N/A
62	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	kab/kota				N/A	N/A	N/A	7,00	10,00	N/A	N/A	N/A	16	-	N/A	N/A	N/A	228.57	-
63	Persentase kelompok tribina yang aktif	%				96,10	93,00	85,57	96,25	96,30	96,13	99,01	114,46	97,79	-	100,03	106,46	133,76	101.60	-
64	Persentase UPPKA yang aktif	%				89,75	88,00	68,25	90,50	91,00	90,57	96,59	112,61	91,53	-	100,91	109,76	165,00	101.14	-
65	Jumlah kelompok tribina yang aktif	kelompok				26723	22879	26751	21596	26779	25897	24348	23856	21854	-	96,91	106,42	89,18	101.20	-
66	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	kelompok				15379	10514	15422	7333	15456	13120	10734	9662	7333	-	85,31	102,09	62,65	100	-
67	Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	%				20,00	40,00	60,00	N/A	N/A	20,00	40,00	60,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
68	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	dokumen				N/A	N/A	N/A	7,00	10,00	N/A	N/A	N/A	15	-	N/A	N/A	N/A	214.49	-
69	Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%				28,00	28,15	26,39	29,50	30,00	28,11	28,69	28,42	29,58	-	100,39	101,92	107,69	100,27	-
70	Unmeetneed KB	%				12,75	13,10	12,66	12,89	12,76	13,03	12,90	14,29	11,63	-	97,85	101,55	88,59	110,83	-
71	Jumlah Peserta KB MKJP	peserta				1.346.822	1.370.872	1.394.922	N/A	N/A	1.374.108	1.364.801	1.281.135		N/A	102,03	99,56	91,84	N/A	N/A
72	Jumlah PUS yang ingin anda ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB	PUS				832.303	998.000	767.025	N/A	N/A	866.926	845.979	915.523	N/A	N/A	104,16	84,77	119,36	N/A	N/A
73	Jumlah peserta KB Aktif	peserta				N/A	N/A	N/A	4.282.778	9.534.000	N/A	N/A	N/A	4.346.881	-	N/A	N/A	N/A	101,50	-
74	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	%				N/A	N/A	N/A	11,70	17,50	N/A	N/A	N/A	27,65	-	N/A	N/A	N/A	236,32	-
75	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif	%				100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
76	Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	dokumen				1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
77	Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB	lembaga				20,00	20,00	20,00	N/A	N/A	20,00	30,00	20,00	N/A	N/A	100,00	150,00	100,00	N/A	N/A
78	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				90,00	90,00	90,00	N/A	N/A	100,00	90,00	90,00	N/A	N/A	111,11	100,00	100,00	N/A	N/A
79	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%				N/A	N/A	N/A	90,00	90,00	N/A	N/A	N/A	90,00	90,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
80	Jumlah Laporan Keuangan PD	laporan				4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	4,00	4,00	4,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
81	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan PD	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
82	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik PD	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
83	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
84	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
85	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
86	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
87	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
88	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/rumah/jabatan/rumah dinas/Gedung kantor/kendaraan dinas/ operasional PD	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
89	Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/sarana prasarana kantor dan rumah tangga PD	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
90	Jumlah unit penyediaan sarana prasarana kantor PD	unit				146,00	10,00	10,00	N/A	N/A	146,00	10,00	10,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
91	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	unit				100,00	102,00	100,00	N/A	N/A	100,00	102,00	-	N/A	N/A	100,00	100,00	0,00	0,00	-
92	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/bintek/seminar	orang				20	20	20	N/A	N/A	20	20	20	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
93	Jumlah laporan informasi publik PD	laporan				3,00	3,00	3,00	N/A	N/A	3,00	3,00	3,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
94	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian PD	bulan				12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	12,00	12,00	12,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
95	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
96	Jumlah dokumen Perencanaan kinerja PD yang disusun	dokumen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
97	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	dokumen				1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	1,00	1,00	1,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	0,00	-
98	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	laporan				N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-
99	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan				N/A	N/A	N/A	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-
100	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan				N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-
101	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	laporan				N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
102	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan				N/A	N/A	N/A	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-
103	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-
104	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan				N/A	N/A	N/A	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	2,00	2,00	N/A	N/A	N/A	100,00	-

Tabel 2.5.
Kesesuaian Antara Kinerja dengan Target Program Pada Urusan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Indikator kinerja program	Rata-rata tingkat ketercapaian indikator program (%)	Jumlah indikator kinerja kegiatan	Rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan (%)	Tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan	Predikat tingkat kesesuaian kinerja program dan kegiatan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemenuhan Hak Anak	2	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Perlindungan Perempuan	2	100	4	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Perlindungan Khusus Anak	2	100	4	100	100	Sangat tinggi
7	Program Pengendalian Penduduk	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3	100	3	100	100	Sangat Tinggi

Kinerja Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan 2 indikator kinerja program yaitu Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang Responsif Gender dengan realisasi 100%. Persentase Layanan Konsultasi Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak dengan realisasi 63,88%. Kinerja program ini di dukung oleh 2 kegiatan dengan 2 indikator kegiatan dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja kegiatan dan program tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja kegiatan dan program sebesar 100% dan masuk kategori sangat tinggi. Artinya kegiatan yang dilakukan sesuai dan mendukung kinerja program. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain, melalui perluasan cakupan kriteria perempuan yang tadinya hanya perempuan miskin di desa di tambah kelompok perempuan kepala keluarga, difabel

perempuan, buruh migran purna, lansia produktif untuk menjadi peserta pelatihan dalam rangka pemulihan ekonomi di desa pasca pandemi, serta dukungan komitmen untuk meningkatkan pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak menuju anak yang semakin sejahtera.

Kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak dengan 4 indikator kinerja program, yaitu Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan dengan realisasi 4,38 per 100.000. Persentase Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring dengan realisasi 20% melebihi target. Rasio Korban Kekerasan terhadap Anak dengan realisasi 10,33 per 100.000. Persentase Kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring dengan realisasi 15%. Kinerja program ini didukung oleh 8 kegiatan dan 8 indikator kegiatan, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja kegiatan dan program tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja kegiatan dan program sebesar 100% dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi. Artinya kegiatan yang dilakukan sesuai dalam mendukung kinerja program.

Kinerja Program Pengendalian penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan 4 indikator kinerja program yaitu Persentase Pemerintah Daerah yang Menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang dengan realisasi 44,44% melebihi target, Persentase Kabupaten/Kota dalam Pendataan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) dengan realisasi 25% sesuai target, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan realisasi 29,58%. Unmet need dengan realisasi 11,63%. Kinerja program ini didukung oleh kegiatan sebanyak 4 dengan 4 indikator kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian antara kegiatan dengan target kinerja program tersebut dan termasuk kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi. Artinya kegiatan yang dilakukan sesuai dalam mendukung kinerja program. Namun, rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program belum mencapai 100%. Hal ini, disebabkan beberapa kabupaten/kota yang sudah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) belum menjadi pedoman strategis di daerah dalam rangka pembangunan kependudukan.

Kinerja Program Keluarga Sejahtera dengan 3 indikator kinerja program yaitu Persentase Kelompok Tribina yang Aktif Melaporkan Kegiatan dengan realisasi 97,79%, Persentase UPPKA yang Aktif Melaporkan Kegiatan dengan realisasi 91,53%, Persentase Keterisian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota dengan realisasi 25% sesuai target sampai dengan triwulan 3. Kinerja program ini didukung oleh 3 kegiatan dengan 3 indikator. Rata-rata ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian antara kegiatan dengan target kinerja program tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program sebesar 100% dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi. Artinya, kegiatan yang dilakukan sesuai dalam mendukung kinerja program. Hal ini dikarenakan peningkatan keaktifan kader tribina (BKB, BKL dan BKR) untuk mendukung ketahanan keluarga. Sedangkan untuk meningkatkan

ketahanan keluarga dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

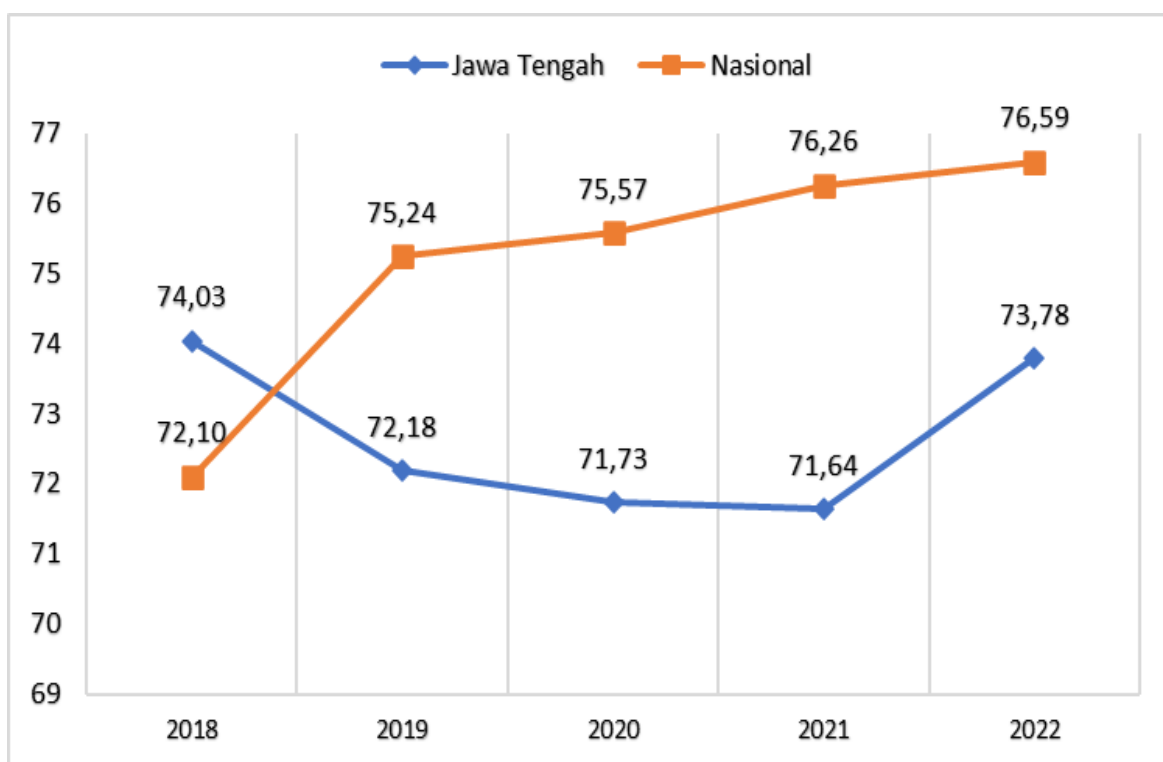
Tabel 2.6

Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun/ Komposit	2018	2019	2020	2021	2022
IDG	74,03	72,18	71,73	71,64	73,78
Keterlibatan perempuan di Parlemen	22	19,17	18,80	18,33	20
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	47,57	49,36	50,20	50,67	50,72
Sumbangan Pendapatan Perempuan	34,28	34,31	34,29	34,60	34,59

Gambar 2.2

Grafik IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022

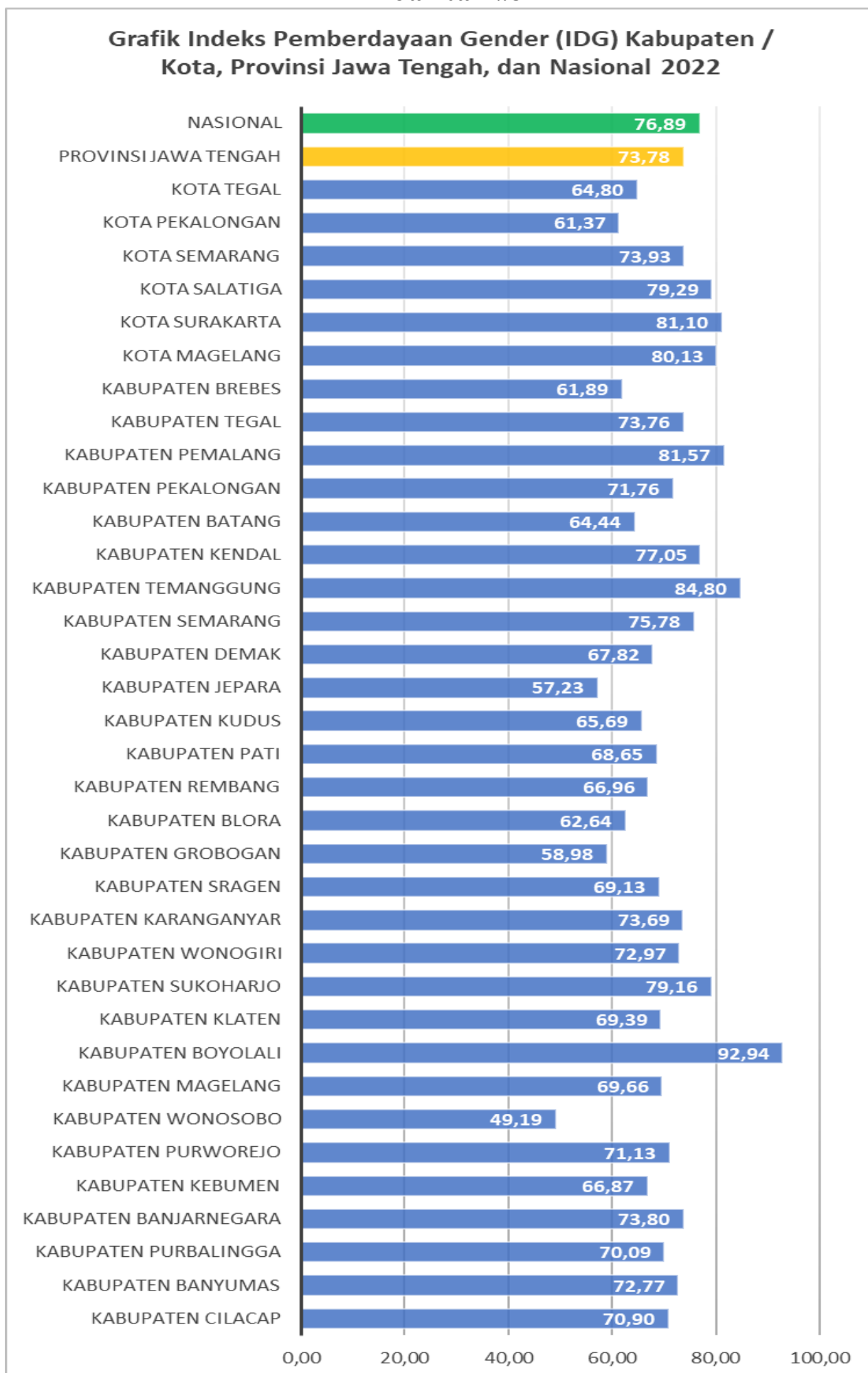


Kinerja Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam beberapa tahun mengalami penurunan karena keterwakilan perempuan di parlemen terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen semua pihak dalam mendorong partisipasi perempuan di pentas politik dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami penurunan dan di tahun 2022 mengalami peningkatan capaian yaitu 73,78.

Tabel 2.7
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten / Kota, Provinsi
Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Provinsi/ Kabupaten Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	62.11	69.13	70.22	70.67	70.90
2	Kabupaten Banyumas	68.11	71.92	71.74	70.10	72.77
3	Kabupaten Purbalingga	75.51	70.60	70.27	70.99	70.09
4	Kabupaten Banjarnegara	65.12	72.84	73.20	73.79	73.80
5	Kabupaten Kebumen	68.09	67.15	66.89	66.86	66.87
6	Kabupaten Purworejo	71.61	70.03	69.83	70.09	71.13
7	Kabupaten Wonosobo	51.41	46.29	48.70	48.68	49.19
8	Kabupaten Magelang	71.21	67.74	69.65	69.64	69.66
9	Kabupaten Boyolali	65.61	81.88	81.95	82.23	82.94
10	Kabupaten Klaten	60.25	72.35	69.42	71.88	69.39
11	Kabupaten Sukoharjo	76.17	78.52	77.98	77.69	79.16
12	Kabupaten Wonogiri	63.80	71.88	71.56	71.55	72.97
13	Kabupaten Karanganyar	80.51	74.76	74.29	73.38	73.69
14	Kabupaten Sragen	62.48	65.07	65.20	67.14	69.13
15	Kabupaten Grobogan	53.70	56.31	57.18	58.03	58.98
16	Kabupaten Blora	70.72	65.59	64.37	64.36	62.64
17	Kabupaten Rembang	73.12	65.79	65.78	65.88	66.96
18	Kabupaten Pati	66.55	66.99	66.69	66.65	68.65
19	Kabupaten Kudus	62.07	65.24	65.18	65.54	65.69
20	Kabupaten Jepara	50.62	58.20	55.76	56.66	57.23
21	Kabupaten Demak	70.79	67.20	66.85	66.83	67.82
22	Kabupaten Semarang	77.41	74.97	75.40	78.35	75.78
23	Kabupaten Temanggung	82.01	84.46	84.21	84.56	84.80
24	Kabupaten Kendal	76.78	77.24	76.96	76.95	77.05
25	Kabupaten Batang	66.29	63.78	63.81	64.43	64.44
26	Kabupaten Pekalongan	73.19	70.87	71.68	70.54	71.76
27	Kabupaten Pemalang	68.95	80.08	80.95	81.27	81.57
28	Kabupaten Tegal	69.25	72.58	72.12	72.32	73.76
29	Kabupaten Brebes	60.94	62.04	61.93	61.89	61.89
30	Kota Magelang	76.30	76.81	76.35	78.65	80.13
31	Kota Surakarta	77.10	77.88	79.42	79.32	81.10
32	Kota Salatiga	82.16	76.19	76.07	79.08	79.29
33	Kota Semarang	75.55	74.57	74.67	73.64	73.93
34	Kota Pekalongan	68.62	60.95	58.29	57.87	61.37
35	Kota Tegal	79.57	63.66	64.07	63.34	64.80
36	PROVINSI JAWA TENGAH	74.03	72.18	71.73	71.64	73.78
	NASIONAL	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59

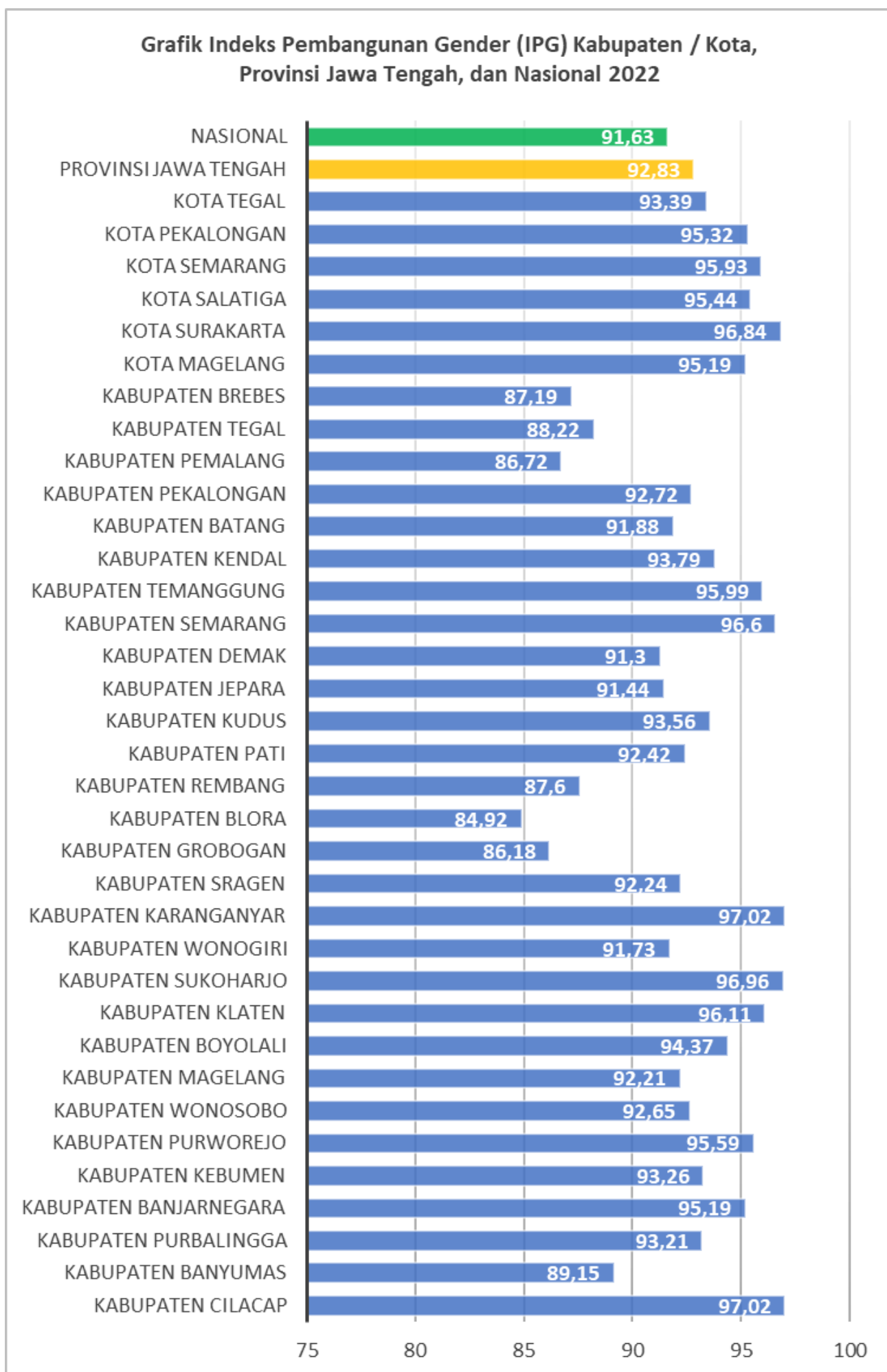
Gambar 2.3



Tabel 2.8
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten / Kota, Provinsi
Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Provinsi/ Kabupaten Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	86.53	86.67	86.69	87.00	87.02
2	Kabupaten Banyumas	87.94	88.20	88.27	88.54	89.15
3	Kabupaten Purbalingga	92.32	92.68	92.78	93.08	93.21
4	Kabupaten Banjarnegara	95.18	95.38	95.28	95.32	95.19
5	Kabupaten Kebumen	93.09	93.34	93.05	93.06	93.26
6	Kabupaten Purworejo	95.11	94.92	94.96	95.33	95.59
7	Kabupaten Wonosobo	92.91	92.72	92.75	92.78	92.65
8	Kabupaten Magelang	92.23	91.78	91.81	91.89	92.21
9	Kabupaten Boyolali	93.24	93.50	94.19	94.22	94.37
10	Kabupaten Klaten	96.00	96.04	96.17	96.00	96.11
11	Kabupaten Sukoharjo	96.73	96.58	96.49	96.52	96.96
12	Kabupaten Wonogiri	91.13	91.41	91.08	91.07	91.73
13	Kabupaten Karanganyar	96.61	96.48	96.52	96.63	97.03
14	Kabupaten Sragen	92.27	91.40	91.62	91.68	92.24
15	Kabupaten Grobogan	85.81	85.98	86.14	85.89	86.18
16	Kabupaten Blora	83.79	83.96	83.88	84.59	84.92
17	Kabupaten Rembang	86.49	86.85	87.00	87.32	87.60
18	Kabupaten Pati	91.50	91.60	91.50	92.21	92.42
19	Kabupaten Kudus	92.89	92.90	92.75	92.96	93.56
20	Kabupaten Jepara	90.66	90.91	90.99	91.28	91.44
21	Kabupaten Demak	90.40	90.57	90.90	91.16	91.30
22	Kabupaten Semarang	96.35	96.40	96.38	96.61	96.60
23	Kabupaten Temanggung	95.62	95.10	95.31	95.74	95.99
24	Kabupaten Kendal	92.96	92.85	93.19	93.30	93.79
25	Kabupaten Batang	90.65	91.08	91.47	91.86	91.88
26	Kabupaten Pekalongan	92.87	92.58	92.48	92.56	92.72
27	Kabupaten Pemalang	85.49	85.81	85.83	86.49	86.72
28	Kabupaten Tegal	86.95	86.74	86.79	87.53	88.22
29	Kabupaten Brebes	86.24	86.35	86.36	86.65	87.19
30	Kota Magelang	96.07	95.51	95.27	95.54	95.91
31	Kota Surakarta	96.82	96.72	96.84	96.89	96.84
32	Kota Salatiga	95.12	95.00	95.18	95.37	95.44
33	Kota Semarang	95.82	95.55	95.49	95.67	95.93
34	Kota Pekalongan	94.59	94.92	95.17	95.42	95.32
35	Kota Tegal	93.45	93.37	93.18	93.26	93.39
36	PROVINSI JAWA TENGAH	91.95	91.89	92.18	92.48	92.83
	NASIONAL	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

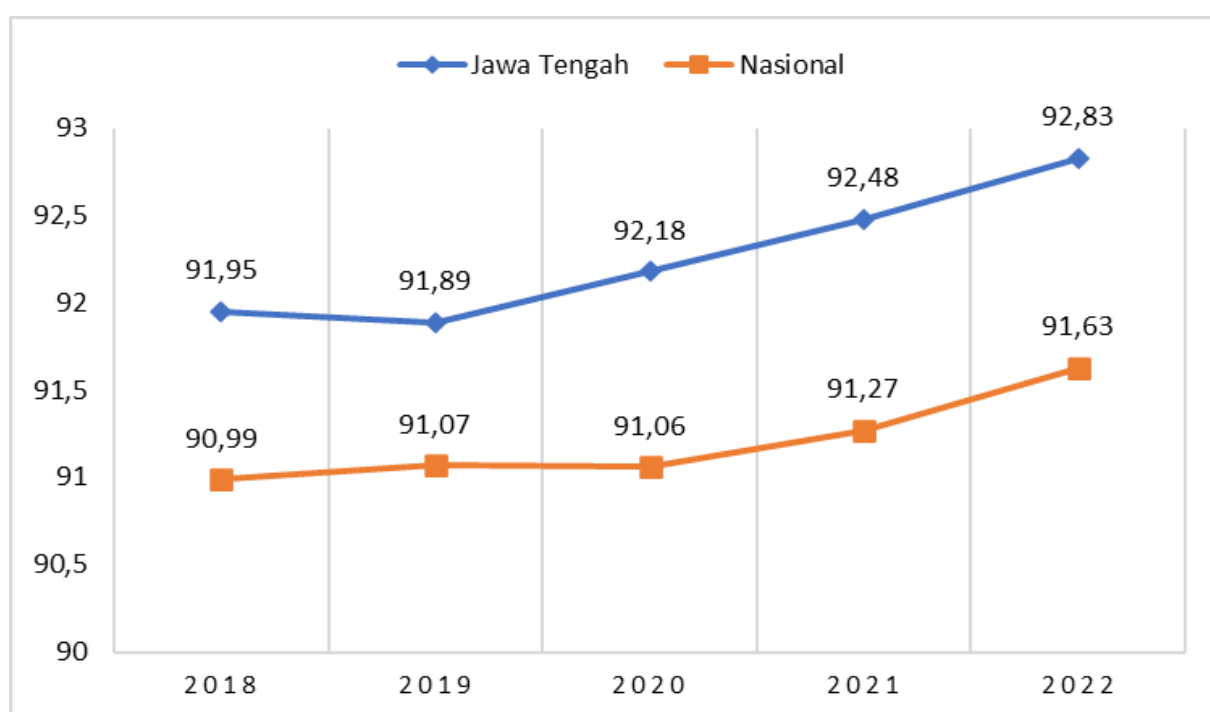
Gambar 2.4



Tabel 2.9
Data IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun/ Komposit	2018	2019	2020	2021	2022
IPG	91,95	91,89	92,18	92,48	92,83
Rata-rata lama sekolah	7,37	7,54	7,7	7,7	7,9
Harapan lama sekolah	12,63	12,67	12,74	12,83	12,85
Pengeluaran per kapita	10777 ribu rupiah	11102 ribu rupiah	10930 ribu rupiah	10480 ribu rupiah	10098 ribu rupiah
Usia harapan hidup	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57

Gambar 2.5
Grafik IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Kesetaraan Gender dalam pembangunan Sumber Daya Manusia di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya seluruh indikator komposit pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hal tersebut menandai bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPG Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022 dengan capaian diatas capaian Nasional.

2. Pemenuhan Hak Anak

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan dengan peningkatan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan hak tumbuh

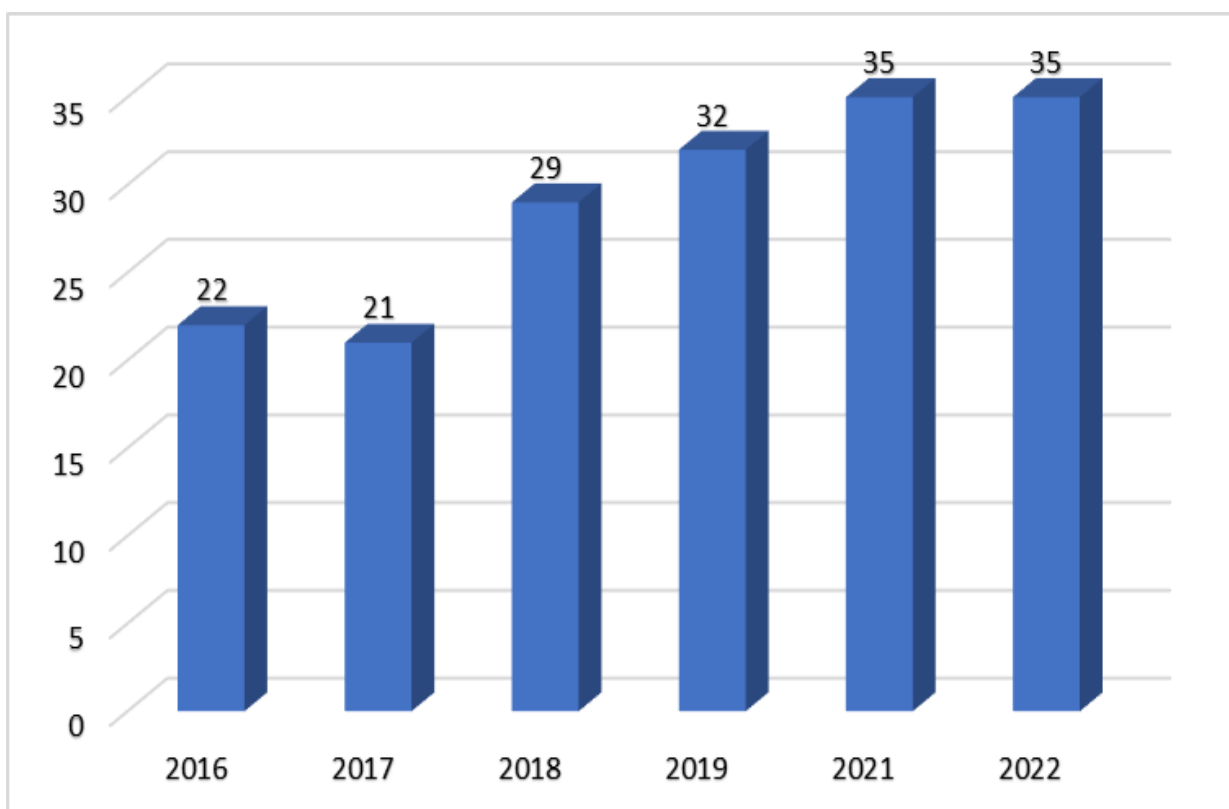
kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil pemeringkatan capaian pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama.

Tabel 2.10.
Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kategori Tingkat Pratama, Tingkat Madya, Tingkat Nindya Dan Tingkat Utama Di Kabupaten/Kota Tahun 2017 - 2022

Tahun	Tingkat Utama (kab/kota)	Tingkat Nindya (kab/kota)	Tingkat Madya (kab/kota)	Tingkat Pratama (kab/kota)	Jumlah (kab/kota)	% (kab/ kota)
2016	-	1	6	15	22	62,85
2017	1	1	5	14	21	60,00
2018	1	1	6	21	29	82,86
2019	1	5	13	13	32	91,43
2021	1	7	14	13	35	100
2022	1	7	17	10	35	100

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.6
Grafik Capaian KLA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2022



Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi capaian indikator KLA pada seluruh kategori menunjukkan tren meningkat dari tahun 2016 sebesar 22 kabupaten/kota (62,85%) menjadi 35 kabupaten/kota (100%) di tahun 2021 dan tahun 2022. Capaian tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek penghargaan semata tetapi juga mempresentasikan dengan kondisi riil dilapangan.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak.

Tabel 2.11.

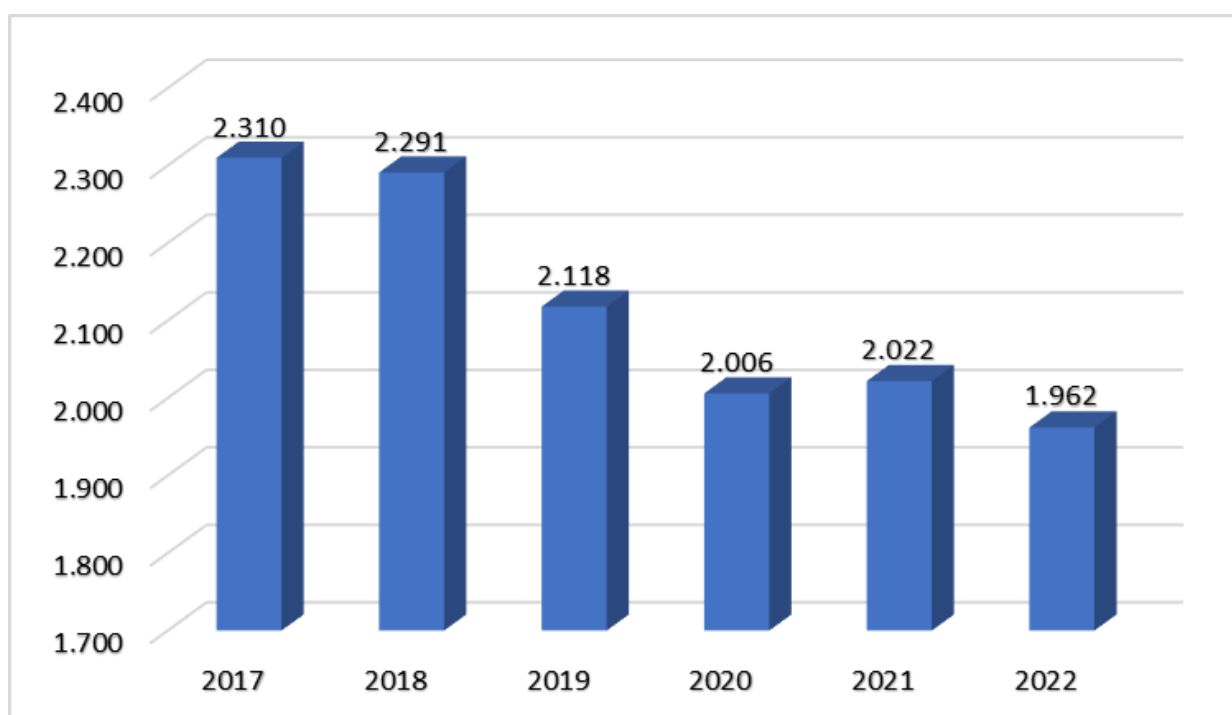
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017-2022

Kelompok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan Dewasa	920	1.017	964	809	937	810
Anak	1.390	1.274	1.154	1.197	1.085	1.152
Jumlah	2.310	2.291	2.118	2.006	2.022	1.962

Sumber: SIMFONI PPA Kementerian PPPA, 2022

Gambar 2.7

Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2022



Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan dari 2.310 kasus menjadi 2.006 kasus, namun pada tahun 2021 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 18 kasus, kemudian menurun lagi pada tahun 2022 sejumlah 810 kasus. Jika dilihat pada kasusnya, jenis kekerasan tertinggi pada Perempuan Dewasa adalah kasus Kekerasan fisik, sedangkan jenis kekerasan tertinggi pada anak adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar di 35 kabupaten/kota.

Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan perempuan yang tertinggi ada di Kabupaten Semarang sebanyak 54 kasus, sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Blora sebanyak 4 kasus. Tingginya jumlah kasus bisa terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor menjadi lebih tinggi.

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut masih cukup tinggi sehingga ke depan perlu upaya lebih keras untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai salah satunya sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif yang terlihat dari semakin tingginya kesadaran masyarakat akan penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Kelompok rentan lain yang membutuhkan perlindungan selain korban kekerasan, adalah korban trafficking, ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja migran, perempuan dalam bencana, perempuan dengan penyandang disabilitas, perempuan lansia, dan perempuan kepala keluarga. Sehingga upaya yang dilakukan adalah assesment kebutuhan mereka dan memberikan kegiatan yang sesuai dengan kondisi kelompok perempuan rentan tersebut.

Selain itu, terdapat kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, pekerja anak, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan (perkawinan anak).

Untuk anak penyandang disabilitas, pada tahun 2021 tercatat 13.222 anak. Untuk anak yang terpapar HIV/AIDS dari 2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat ada 164 anak (Dinkes Prov. Jateng, 2021). Untuk anak terlantar di Jawa Tengah pada tahun 2021 tercatat ada 10.620 anak. Untuk perkawinan anak tahun 2021 tercatat ada 11.686 anak di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kasus trafficking atau perdagangan anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat ada 103 kasus. Intervensi penanganan anak rentan tersebut dengan konvergensi kegiatan dengan stakeholder terkait baik vertikal maupun di tingkat daerah.

4. Ketahanan Keluarga

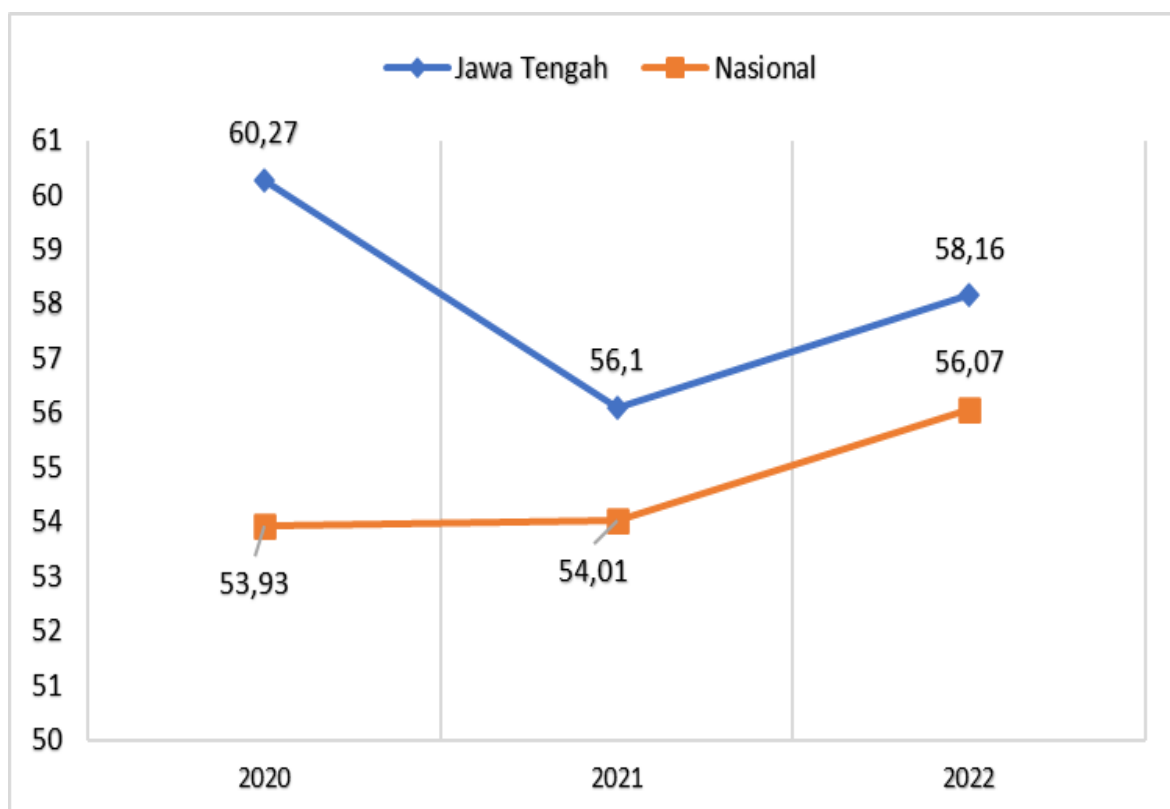
Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Terdapat 3 dimensi, 11 Indikator dan 17 variabel iBangga. Dalam indikator ini, kualitas keluarga dicirikan dengan dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan.

Tabel 2.12.
Indeks Pembangunan Keluarga
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jawa Tengah	Nasional
2020	60,27	53,93
2021	56,10	54,01
2022	58,16	-

Sumber: BKKBN RI, 2022

Gambar 2.8
Grafik Capaian Indeks Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2022



5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

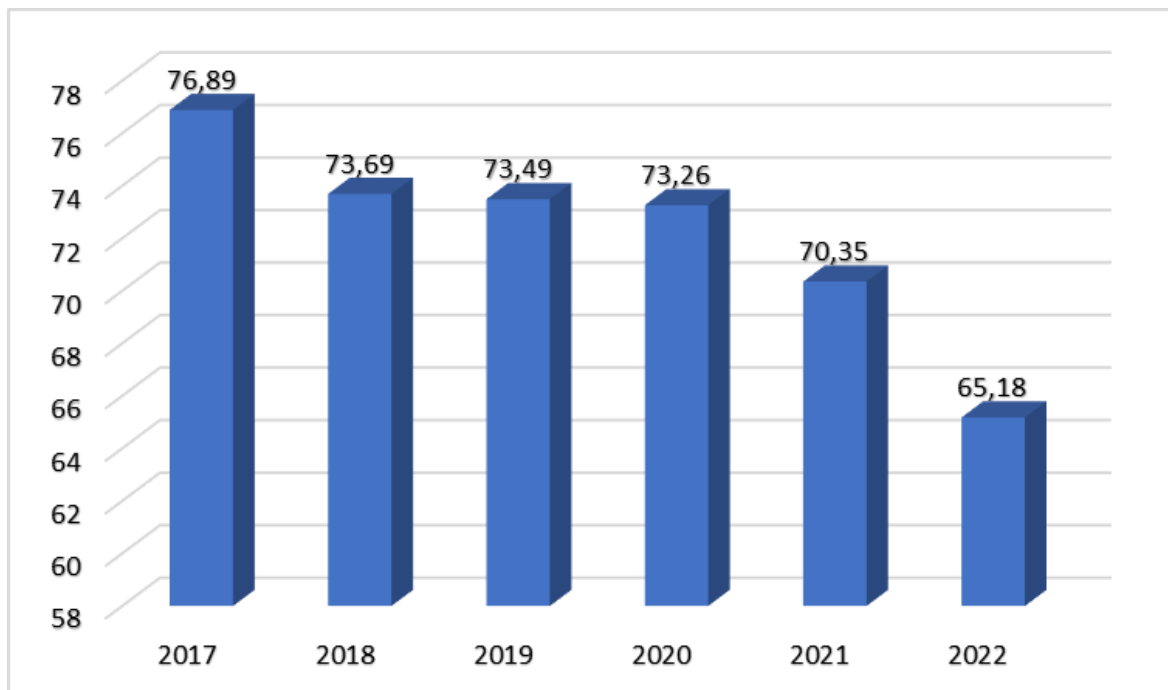
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada peningkatan kesertaan ber-KB serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peserta KB aktif di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 masih penurunan, dari 76,89% tahun 2017 menurun menjadi 65,18% tahun 2022. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.13.
Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
2017	6.610.377	5.082.844	76.89
2018	6.527.869	4.810.077	73.69
2019	6.652.451	4.888.651	73.49
2020	6.525.048	4.757.722	73,26
2021	6,408,024	4.508.188	70,35
2022	6.669.158	4.346.881	65,18

Sumber: BKKBN RI, 2022

Gambar 2.9
Grafik Capaian CPR di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022



Pada kurun waktu 6 tahun terakhir (2017-2022) CPR di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami penurunan, CPR pada tahun 2017 sebesar 76,89% terus mengalami penurunan menjadi 65,18% pada tahun 2022. Penurunan tersebut antara lain disebabkan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP, keyakinan sebagian masyarakat yang salah terkait KB, kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat ber-KB, serta terbatasnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ada saat ini.

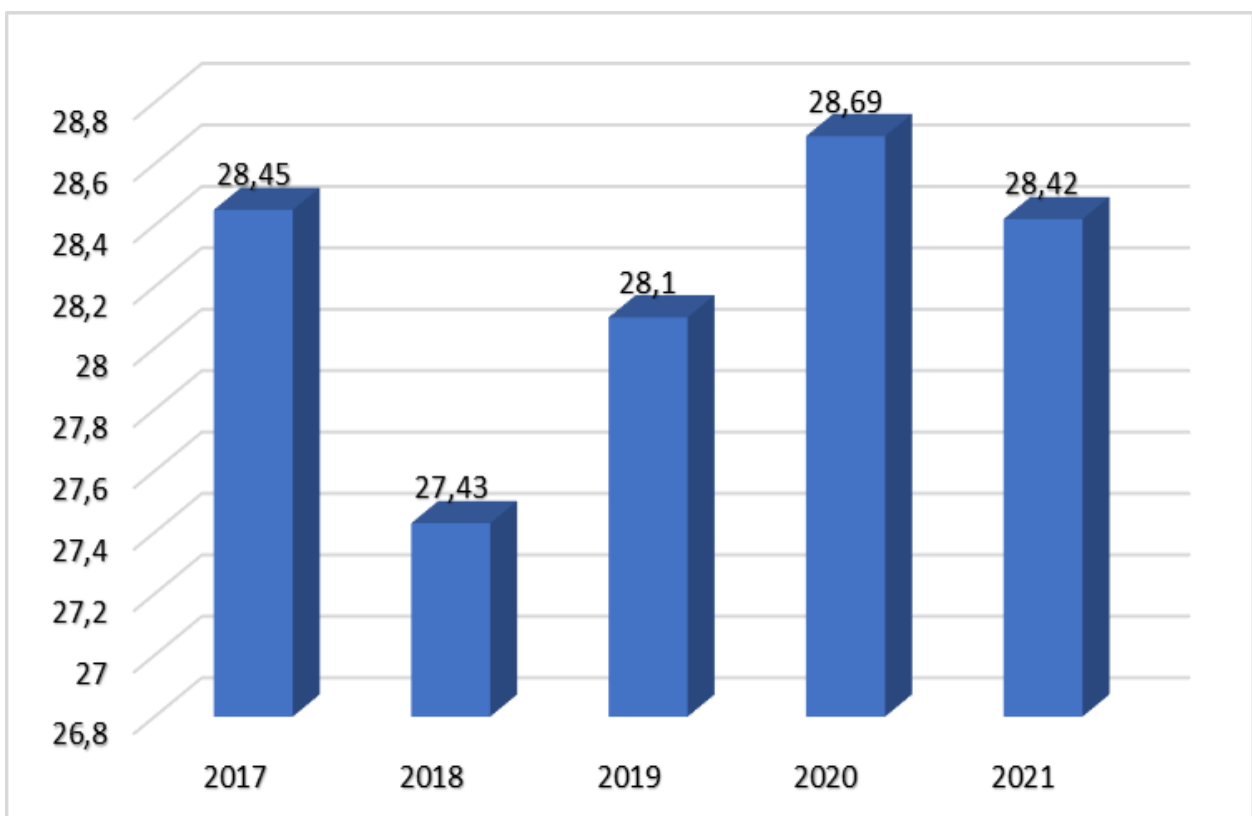
Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah. Pemakaian alat kontrasepsi MKJP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, dari tahun 2017 sebesar 28,45% menjadi 29,58% pada tahun 2022. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017- 2022

Tahun	Peserta KB Aktif	Peserta KB MKJP					
		IUD	MOW	MOP	IMPLAN	Jumlah	%
2017	5.082.844	516.068	254.987	39.649	635.232	1.445.936	28,45
2018	4.810.077	428.981	233.859	32.886	623.677	1.319.403	27,43
2019	4.888.651	446.425	239.619	30.122	657.942	1.374.108	28.10
2020	4.757.722	447.567	232.244	25.658	659.332	1.364.801	28.69
2021	4.508.188	419.097	222.844	22.017	617.177	1.281.135	28,42
2022	4.346.881	386.774	199.958	19.219	679.991	1.285.942	29,58

Sumber: BKKBN RI, 2022

Gambar 2.10
Grafik Capaian MKJP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022



a. Unmet Need

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak ber-KB (*unmetneed KB*) dari tahun 2017 – 2021 secara umum mengalami perkembangan fluktuatif namun cenderung meningkat. Capaian tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 14,28%. Pada tahun 2022 *unmetneed KB* menurun menjadi 11,3% atau 778.610 orang.

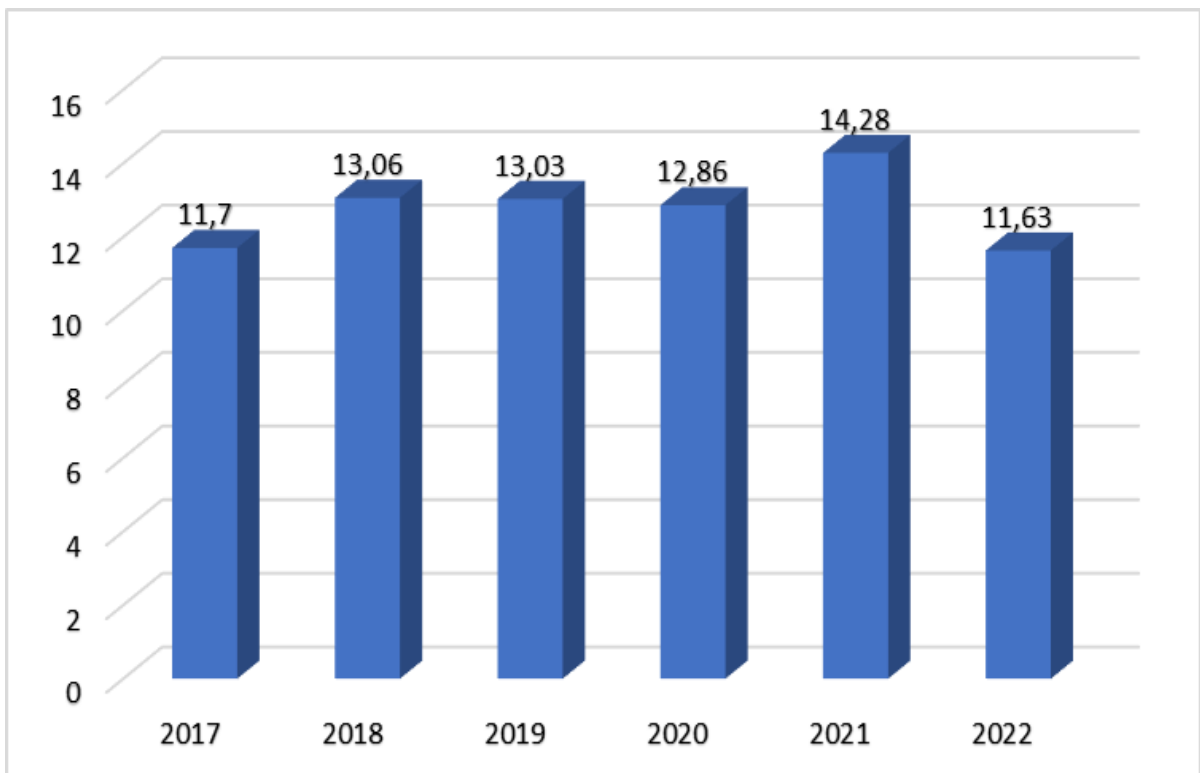
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi *unmetneed KB* antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase *unmetneed KB* nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB.

Tabel 2.15.
Unmetneed KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (orang)	Unmet Need KB (%)
2017	6.610.377	773.808	11.70
2018	6.527.869	852.677	13.06
2019	6.652.451	866.926	13.03
2020	6.525.048	839.434	12.86
2021	6,408,024	915.523	14,28
2022	6.669.158	687.858	11,63

Sumber: BKKBN RI, 2022

Gambar 2.11
Grafik Capaian Unmetneed di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022



b. Peran Aktif Kelompok Tribina

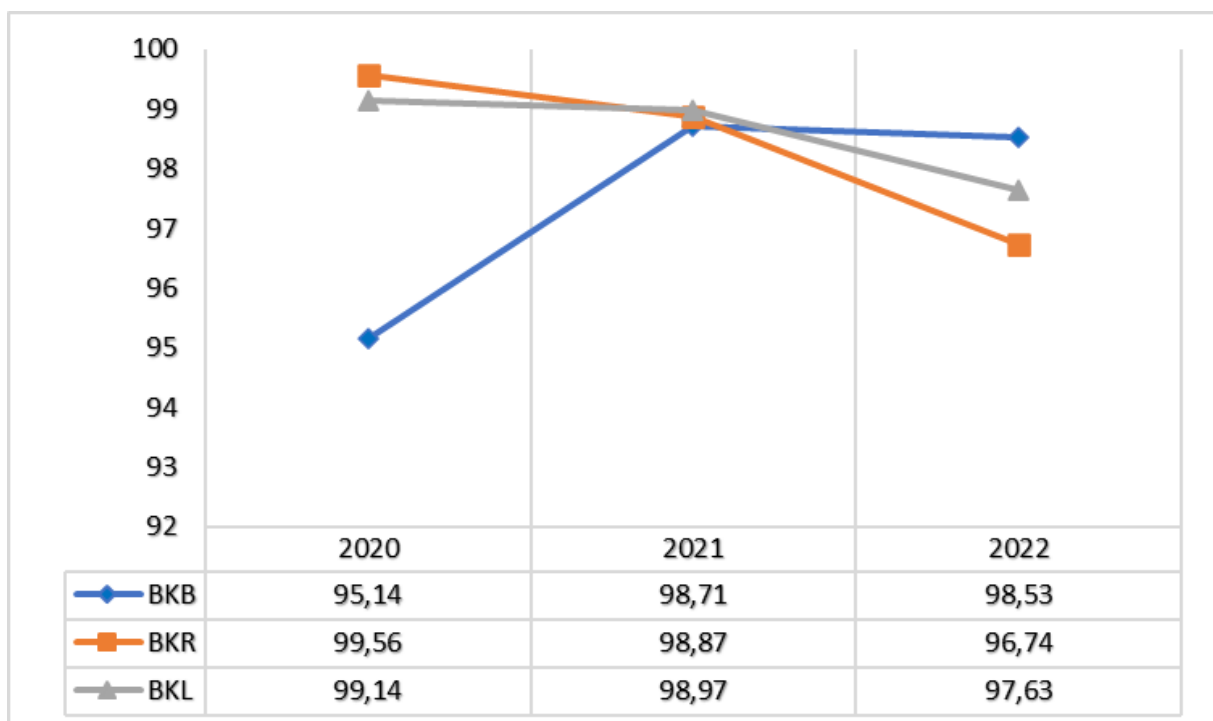
Peningkatan ketahanan keluarga sangat ditentukan pada peran aktif Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Keaktifan kelompok BKB tahun 2020-2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Keaktifan tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 98,53%. Pada kelompok BKR keaktifan kelompok menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, tahun 2020 mencapai 99,56% kemudian keaktifan kelompok kembali menurun sampai dengan tahun 2022 sebesar 96,74%. Pada kelompok BKL keaktifan menunjukkan perkembangan yang serupa yaitu fluktuatif namun cenderung menurun, keaktifan tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 99,14%, dan menurun hingga tahun 2022 menjadi 97,63%. Perkembangan keaktifan kelompok BKB, BKR dan BKL dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Keaktifan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) Tahun 2020 – 2022

Tahun	BKB			BKR			BKL		
	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%
2020	11.071	10.533	95,14	5.947	5.921	99,56	7.763	7.696	99,14
2021	10.473	10.338	98,71	5.860	5.794	98,87	7.804	7.724	98,97
2022	9.184	9.049	98,53	5.490	5.311	96,74	7.180	7.010	97,63

Sumber: BKKBN RI, 2022

Gambar 2.12
Grafik Capaian BKB, BKR, BKL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022



c. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

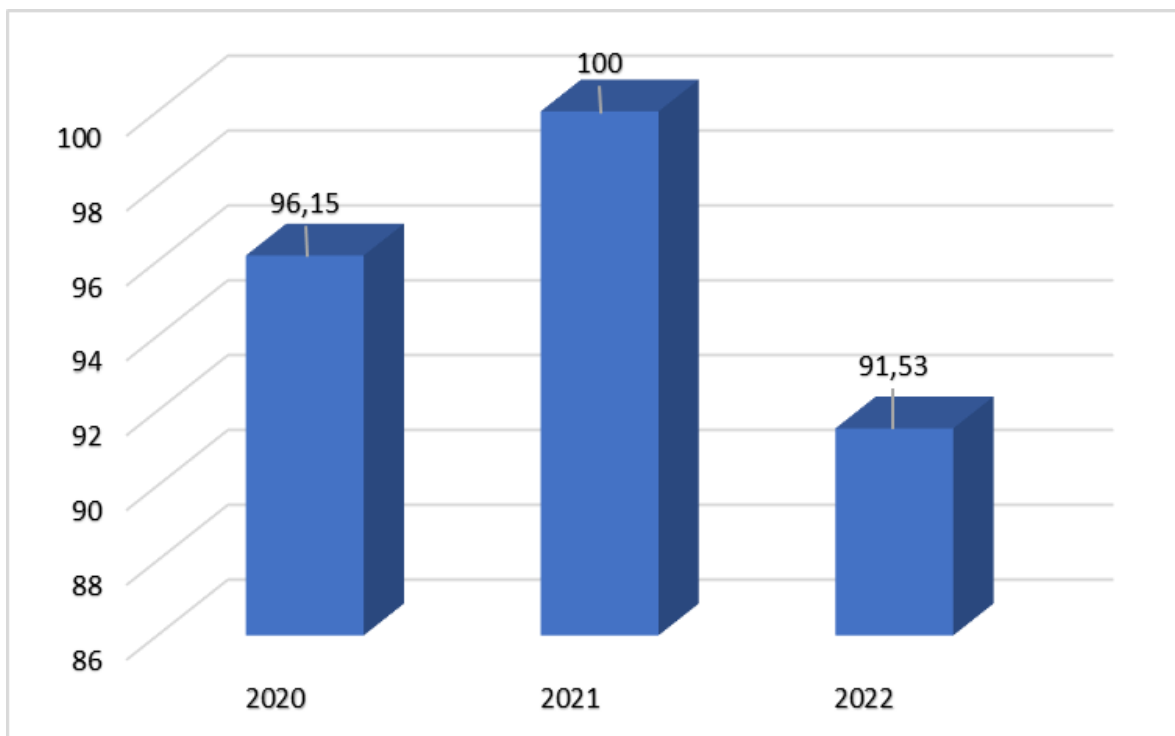
Peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) memberi peluang bagi setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha, berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar bertujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga dalam rangka mengurangi keluarga pra sejahtera/keluarga miskin sekaligus memantapkan keikutsertaan masyarakat ber-KB. Jumlah kelompok UPPKA yang aktif menunjukkan perkembangan fluktuatif. Tahun 2020 keaktifan kelompok UPPKA meningkat mencapai 100%, namun kembali menurun di tahun 2022 menjadi 91,53%. Perkembangan keaktifan UPPKA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17
Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) Tahun 2020 – 2022

Tahun	Kelompok UPPKS		
	Jumlah	Aktif	%
2020	10.733	10.320	96,15
2021	8.580	8.580	100
2022	7.333	6.712	91,53

Sumber: BKKBN RI, 2022

Gambar 2.13
Grafik Capaian UPPKA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022



d. ASFR (Age Specific Fertility Rate)

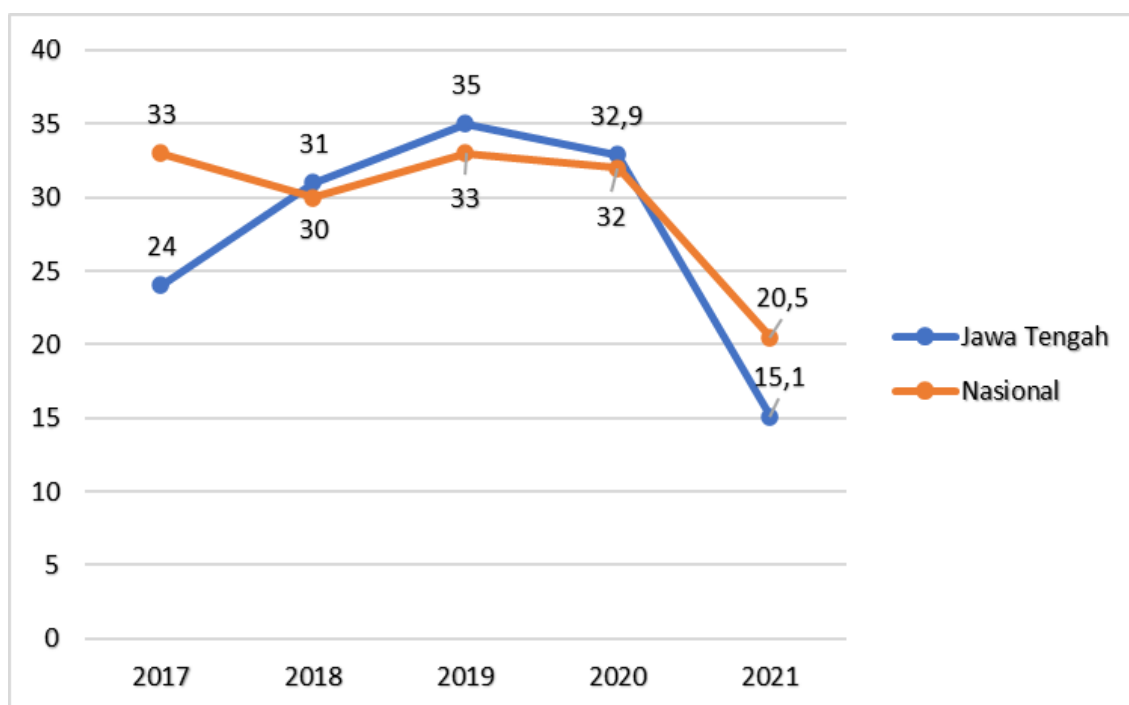
Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relatif tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

Tabel 2.18
Data Asfr 15-19 Tahun Dari Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jawa Tengah	24	31	35	32,9	15,1
2	Nasional	33	30	33	32	20,5

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.14
Grafik Capaian ASFR di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 - 2022



e. Kampung Keluarga Berkualitas

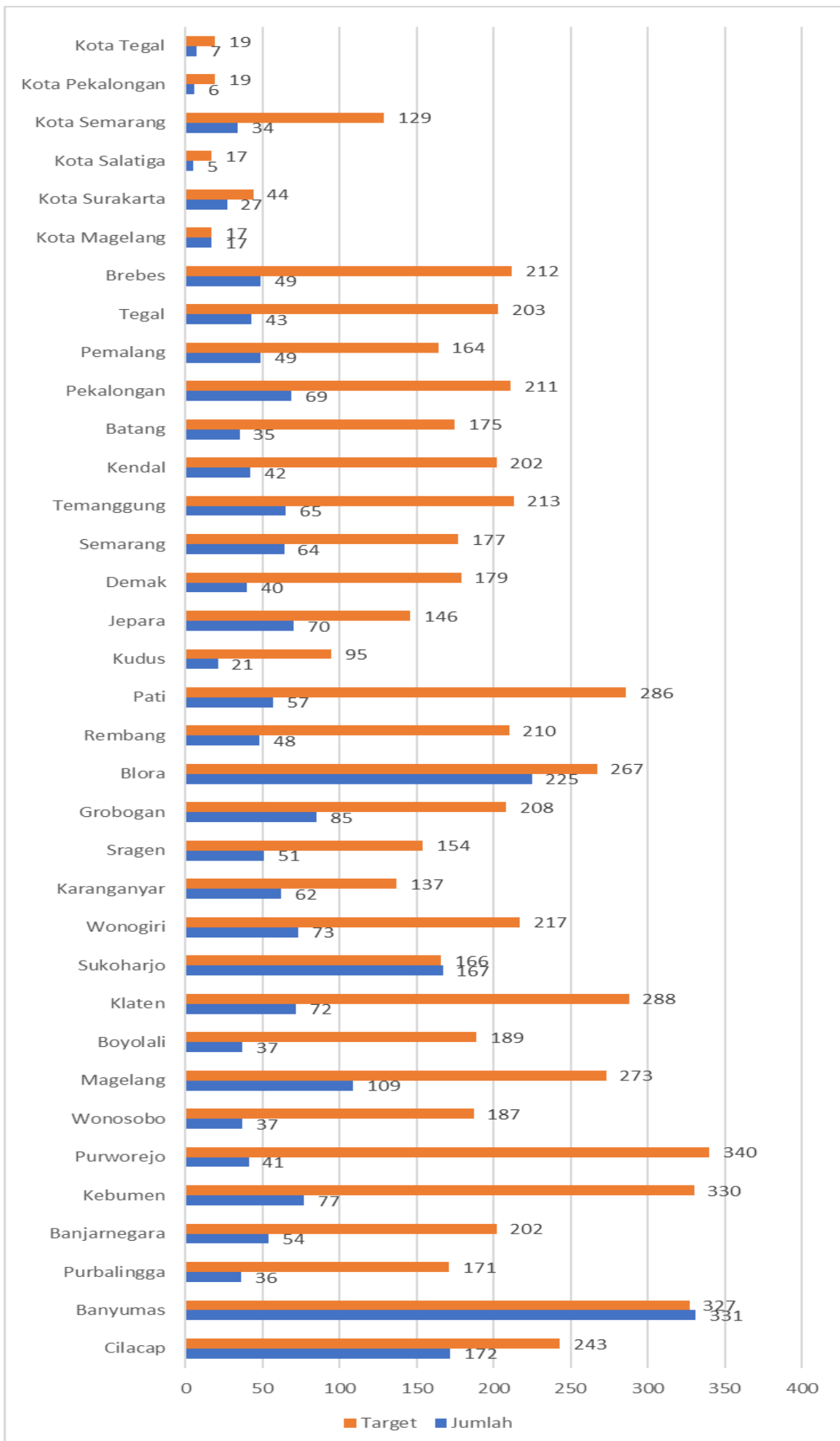
Pentingnya Kampung KB sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga dan menekan angka kelahiran untuk mendorong peningkatan kualitas SDM yang lebih baik, sehingga dibutuhkan upaya sinergis mulai dari tingkat wilayah terkecil (desa). Berikut adalah data Kampung KB di Jawa Tengah :

Tabel 2.19
Data Kampung KB
Provinsi Jawa Tengah Per Februari 2023

Kabupaten/kota	Jumlah	Target
Cilacap	172	243
Banyumas	331	327
Purbalingga	36	171
Banjarnegara	54	202
Kebumen	77	330
Purworejo	41	340
Wonosobo	37	187
Magelang	109	273
Boyolali	37	189
Klaten	72	288
Sukoharjo	167	166
Wonogiri	73	217
Karanganyar	62	137
Sragen	51	154
Grobogan	85	208
Blora	225	267
Rembang	48	210
Pati	57	286
Kudus	21	95
Jepara	70	146
Demak	40	179
Semarang	64	177
Temanggung	65	213
Kendal	42	202
Batang	35	175
Pekalongan	69	211
Pemalang	49	164
Tegal	43	203
Brebes	49	212
Kota Magelang	17	17
Kota Surakarta	27	44
Kota Salatiga	5	17
Kota Semarang	34	129
Kota Pekalongan	6	19
Kota Tegal	7	19
Total	2.377	6417

Sumber: Web Kampung KB.

Gambar 2.15
Grafik Jumlah Kampung KB Provinsi Jawa Tengah Per Februari 2023



Selanjutnya realisasi pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019-2022 pada Perubahan Renstra terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum , Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	40.081.181	2.715.200	N/A	N/A	N/A	40.081.181	2.715.200	N/A	N/A	N/A	3.816.487.827	2.606.292.463	N/A	N/A	95,22	95,99	N/A	N/A	-0,93	-0,32
1.2	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	314.500	252.219	N/A	N/A	N/A	314.500	252.219	N/A	N/A	N/A	291.520.000	229.157.000	N/A	N/A	92,69	90,86	N/A	N/A	-0,20	-0,21
1.3	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	11.100	9.600	N/A	N/A	N/A	11.100	9.600	N/A	N/A	N/A	11.098.000	9.600.000	N/A	N/A	99,98	100	N/A	N/A	-0,14	-0,13
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah.	639.490	425.640	N/A	N/A	N/A	639.490	425.640	N/A	N/A	N/A	453.573.573	385.125.577	N/A	N/A	70,93	90,48	N/A	N/A	-0,33	-0,15
1.5	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	50.167	57.959	N/A	N/A	N/A	50.167	57.959	N/A	N/A	N/A	49.562.000	57.948.000	N/A	N/A	98,79	99,98	N/A	N/A	0,16	0,17
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan pelayanan perkantoran Perangkat Daerah	811.250	923.282	N/A	N/A	N/A	811.250	923.282	N/A	N/A	N/A	782.981.040	921.575.940	N/A	N/A	96,52	99,82	N/A	N/A	0,14	0,18
1.7	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah Perangkat Daerah.	481.000	88.492	N/A	N/A	N/A	481.000	88.492	N/A	N/A	N/A	480.879.809	87.890.000	N/A	N/A	99,98	99,32	N/A	N/A	-0,82	-0,82

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1.8	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan dan Minum Perangkat Daerah	102.500	87.062	N/A	N/A	N/A	102.500	87.062	N/A	N/A	N/A	102.463.500	86.757.000	N/A	N/A	99,96	99,65	N/A	N/A	-0,15	-0,15
1.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12.025	2.520	N/A	N/A	N/A	12.025	2.520	N/A	N/A	N/A	12.022.000	2.508.500	N/A	N/A	99,98	99,54	N/A	N/A	-0,79	-0,79
1.10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	751.045	379.013	N/A	N/A	N/A	751.045	379.013	N/A	N/A	N/A	735.490.605	344.986.638	N/A	N/A	97,93	91,02	N/A	N/A	-0,50	-0,53
1.11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	261.702	244.235	N/A	N/A	N/A	261.702	244.235	N/A	N/A	N/A	261.614.300	241.315.308	N/A	N/A	99,97	98,8	N/A	N/A	-0,07	-0,08
1.12	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	453.762	45.000	N/A	N/A	N/A	453.762	45.000	N/A	N/A	N/A	452.213.000	43.035.000	N/A	N/A	99,66	95,63	N/A	N/A	-0,90	-0,90
1.13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	35.400	10.200	N/A	N/A	N/A	35.400	10.200	N/A	N/A	N/A	35.370.000	10.200.000	N/A	N/A	99,92	100	N/A	N/A	-0,71	-0,71
1.14	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	18.500	5.120	N/A	N/A	N/A	18.500	5.120	N/A	N/A	N/A	9.450.000	5.079.500	N/A	N/A	51,08	99,21	N/A	N/A	-0,72	-0,46
1.15	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	74.000	50.480	N/A	N/A	N/A	74.000	50.480	N/A	N/A	N/A	73.500.000	49.568.500	N/A	N/A	99,32	98,19	N/A	N/A	-0,32	-0,33

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1.1 6	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.750	134.378	N/A	N/A	N/A	64.750	134.378	N/A	N/A	N/A	64.750.000	131.545.500	N/A	N/A	100	97,89	N/A	N/A	1,08	1,03
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	491.875	314.460	N/A	N/A	N/A	491.875	314.460	N/A	N/A	N/A	472.403.500	305.969.500	N/A	N/A	96,04	97,3	N/A	N/A	-0,36	-0,35
2.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.500	257.173	N/A	N/A	N/A	311.500	257.173	N/A	N/A	N/A	300.559.500	248.682.500	N/A	N/A	96,49	96,7	N/A	N/A	-0,17	-0,17
2.2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.375	57.287	N/A	N/A	N/A	180.375	57.287	N/A	N/A	N/A	171.844.000	57.287.000	N/A	N/A	95,27	100	N/A	N/A	-0,68	-0,67
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	9.404.570	3.258.326	N/A	N/A	N/A	9.404.570	3.258.326	N/A	N/A	N/A	9.305.585.940	3.164.976.100	N/A	N/A	98,95	97,14	N/A	N/A	-0,65	-0,66
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	5.542.400	1.644.580	N/A	N/A	N/A	5.542.400	1.644.580	N/A	N/A	N/A	5.475.802.850	1.579.066.000	N/A	N/A	98,8	96,02	N/A	N/A	-0,70	-0,71
3.2	Kegiatan Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	774.540	329.790	N/A	N/A	N/A	774.540	329.790	N/A	N/A	N/A	768.572.000	313.185.500	N/A	N/A	99,23	94,97	N/A	N/A	-0,57	-0,59

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
3.3	Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak	893.025	323.481	N/A	N/A	N/A	893.025	323.481	N/A	N/A	N/A	891.425.000	323.480.900	N/A	N/A	99,82	100	N/A	N/A	-0,64	-0,64
3.4	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak	305.250	91.587	N/A	N/A	N/A	305.250	91.587	N/A	N/A	N/A	305.242.900	91.587.000	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,70	-0,70
3.5	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga	1.265.905	508.082	N/A	N/A	N/A	1.265.905	508.082	N/A	N/A	N/A	1.255.542.290	504.715.400	N/A	N/A	99,18	99,34	N/A	N/A	-0,60	-0,60
3.6	Kegiatan Penyusunan data dan informasi PPA	623.450	360.806	N/A	N/A	N/A	623.450	360.806	N/A	N/A	N/A	609.000.900	352.941.300	N/A	N/A	97,68	97,82	N/A	N/A	-0,42	-0,42
4	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	2.763.530	1.343.989	N/A	N/A	N/A	2.763.530	1.343.989	N/A	N/A	N/A	2.738.696.205	1.329.899.054	N/A	N/A	99,1	98,95	N/A	N/A	-0,51	-0,51
4.1	Kegiatan Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	1.315.442	379.093	N/A	N/A	N/A	1.315.442	379.093	N/A	N/A	N/A	1.298.181.000	379.011.722	N/A	N/A	98,69	99,98	N/A	N/A	-0,71	-0,71
4.2	Kegiatan layanan Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	223.325	223.325	N/A	N/A	N/A	223.325	223.325	N/A	N/A	N/A	220.622.805	233.320.500	N/A	N/A	98,79	104,48	N/A	N/A	-	0,06

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
4.3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan	270.533	270.533	N/A	N/A	N/A	270.533	270.533	N/A	N/A	N/A	270.484.000	190.225.532	N/A	N/A	99,98	70,32	N/A	N/A	-	-0,30
4.4	Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Kekerasan terhadap anak	529.655	238.208	N/A	N/A	N/A	529.655	238.208	N/A	N/A	N/A	526.703.300	238.708.000	N/A	N/A	99,44	100,21	N/A	N/A	-0,55	-0,55
4.5	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga layanan perlindungan Anak	70.300	33.228	N/A	N/A	N/A	70.300	33.228	N/A	N/A	N/A	70.129.000	33.228.000	N/A	N/A	99,76	100	N/A	N/A	-0,53	-0,53
4.6	Kegiatan Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak yang berhadapan Hukum (ABH)	354.275	259.716	N/A	N/A	N/A	354.275	259.716	N/A	N/A	N/A	352.576.000	255.405.300	N/A	N/A	99,52	98,34	N/A	N/A	-0,27	-0,28
5	Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan keluarga Berencana	6.149.619	4.221.809	N/A	N/A	N/A	6.149.619	4.221.809	N/A	N/A	N/A	6.102.103.300	4.205.395.868	N/A	N/A	99,23	99,61	N/A	N/A	-0,31	-0,31
5.1	Kegiatan Pemaduan Kebijakan dan Pengintegrasian Pendidikan kependudukan	637.880	252.006	N/A	N/A	N/A	637.880	252.006	N/A	N/A	N/A	637.880.000	251.396.000	N/A	N/A	100	99,76	N/A	N/A	-0,60	-0,61
5.2	Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk	189.625	32.418	N/A	N/A	N/A	189.625	32.418	N/A	N/A	N/A	189.585.000	32.058.868	N/A	N/A	99,98	98,89	N/A	N/A	-0,83	-0,83

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5.3	Kegiatan Kesertaan KB MKJP	3.527.506	3.150.095	N/A	N/A	N/A	3.527.506	3.150.095	N/A	N/A	N/A	3.498.880.500	3.148.867.000	N/A	N/A			N/A	N/A	-0,11	-0,10
5.4	Kegiatan Penggerakan dan Pengembangan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	1.678.428	744.760	N/A	N/A	N/A	1.678.428	744.760	N/A	N/A	N/A	1.659.667.800	739.544.000	N/A	N/A	98,88	99,3	N/A	N/A	-0,56	-0,55
5.5	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan dan KB	27.750	6.150	N/A	N/A	N/A	27.750	6.150	N/A	N/A	N/A	27.750.000	6.150.000	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,78	-0,78
5.6	Kegiatan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam Program KB	88.430	36.380	N/A	N/A	N/A	88.430	36.380	N/A	N/A	N/A	88.340.000	36.380.000	N/A	N/A	99,9	100	N/A	N/A	-0,59	-0,59
6	Program Keluarga Sejahtera	1.308.643	547.502	N/A	N/A	N/A	1.308.643	547.502	N/A	N/A	N/A	1.308.637.000	546.665.950	N/A	N/A	99,9995	99,85	N/A	N/A	-0,58	-0,58
6.1	Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga	761.507	378.679	N/A	N/A	N/A	761.507	378.679	N/A	N/A	N/A	761.507.000	377.998.450	N/A	N/A	100	99,82	N/A	N/A	-0,50	-0,50
6.2	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	273.568	44.120	N/A	N/A	N/A	273.568	44.120	N/A	N/A	N/A	273.562.000	44.120.000	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,84	-0,84
6.3	Kegiatan Advokasi Kesejahteraan Keluarga	273.568	124.703	N/A	N/A	N/A	273.568	124.703	N/A	N/A	N/A	273.568.000	124.547.500	N/A	N/A	100	99,88	N/A	N/A	-0,54	-0,54

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PERMENDAGRI 90																					
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	N/A	N/A	10.957.164	12.083.244	15.373.767	N/A	N/A	10.957.164	12.083.244	15.373.767	N/A	N/A	10.656.492.421	11.755.077.427	N/A	N/A	97,26	97,28	0,40	0
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	308.566	396.138	453.500	N/A	N/A	308.566	396.138	453.500	N/A	N/A	306.565.200	389.775.195	N/A	N/A	99,35	98,39	0,47	0
1.2	Administrasi Keuangan	N/A	N/A	8.036.613	9.077.344	11.614.477	N/A	N/A	8.036.613	9.077.344	11.614.477	N/A	N/A	7.792.839.929	8.785.800.319	N/A	N/A	96,97	96,79	0,45	0
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	58.000	64.470	N/A	N/A	N/A	58.000	64.470	N/A	N/A	N/A	57.945.387	N/A	N/A	N/A	99,91	0,11	0
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	17.950	106.200	N/A	N/A	N/A	17.950	106.200	N/A	N/A	N/A	17.740.980	N/A	N/A	N/A	99,91	4,92	0
1.5	Administrasi Umum	N/A	N/A	2.582.976	585.862	635.780	N/A	N/A	2.582.976	585.862	635.780	N/A	N/A	2.533.071.492	4.998.000	N/A	N/A	98,07	98,84	-0,75	0
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	17.500	14.790	N/A	N/A	N/A	17.500	14.790	N/A	N/A	N/A	3.884.140	N/A	N/A	N/A	99,96	-0,15	0
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	1.357.625	1.935.000	N/A	N/A	N/A	1.357.625	1.935.000	N/A	N/A	N/A	8.858.840	N/A	N/A	N/A	97,10	0,43	0
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	572.825	549.550	N/A	N/A	N/A	572.825	549.550	N/A	N/A	N/A	577.176.293	N/A	N/A	N/A	98,98	-0,04	0
1.9	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	N/A	N/A	29.009	N/A	N/A	N/A	N/A	29.009	N/A	N/A	N/A	N/A	24.015.800	N/A	N/A	N/A	82,79	N/A	0,00	0

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	N/A	N/A	4.719.405	3.221.868	2.557.500	N/A	N/A	4.719.405	3.221.868	2.557.500	N/A	N/A	4.581.706.257	3.154.592.514	N/A	N/A	97,08	97,91	-0,46	0
2.1	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	136.940	220.000	455.000	N/A	N/A	136.940	220.000	455.000	N/A	N/A	130.351.628	218.433.486	N/A	N/A	95,19	99,29	2,32	0
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	4.315.919	3.001.868	2.102.500	N/A	N/A	4.315.919	3.001.868	2.102.500	N/A	N/A	4.189.561.129	2.936.159.028	N/A	N/A	97,07	100	-0,51	0
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	266.546	N/A	N/A	N/A	N/A	266.546	N/A	N/A	N/A	N/A	261.793.500	N/A	N/A	N/A	98,22	N/A	0,00	0
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	N/A	N/A	940.884	977.246	1.502.836	N/A	N/A	940.884	977.246	1.502.836	N/A	N/A	674.130.470	568.261.377	N/A	N/A	71,65	99,79	0,60	0
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	N/A	N/A	225.299	213.225	197.211	N/A	N/A	225.299	213.225	197.211	N/A	N/A	223.653.422	212.922.123	N/A	N/A	99,27	99,86	-0,12	0

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Kabupaten/Kota																				
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	599.690	351.522	358.750	N/A	N/A	599.690	351.522	358.750	N/A	N/A	334.602.548	75.225.000	N/A	N/A	55,80	100	-0,40	0
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	115.895	412.499	946.875	N/A	N/A	115.895	412.499	946.875	N/A	N/A	115.874.500	137.697.123	N/A	N/A	99,98	99,78	7,17	0
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	N/A	N/A	451.471	175.000	275.000	N/A	N/A	451.471	175.000	275.000	N/A	N/A	447.212.340	49.481.206	N/A	N/A	99,06	99,46	-0,39	0
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	147.315	50.000	100.000	N/A	N/A	147.315	50.000	100.000	N/A	N/A	145.491.340	49.481.206	N/A	N/A	98,76	98,96	-0,32	0
4.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	125.000	175.000	N/A	N/A	N/A	125.000	175.000	N/A	N/A	N/A	124.968.240	N/A	N/A	N/A	99,97	0,40	0

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	N/A	N/A	307.656	150.000	200.000	N/A	N/A	307.656	150.000	200.000	N/A	N/A	306.187.500	149.847.461	N/A	N/A	99,52	99,90	-0,35	0
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	N/A	N/A	307.656	150.000	200.000	N/A	N/A	307.656	150.000	200.000	N/A	N/A	306.187.500	149.847.461	N/A	N/A	99,52	99,90	-0,35	0
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	N/A	N/A	219.014	1.634.132	639.210	N/A	N/A	219.014	1.634.132	639.210	N/A	N/A	219.014.000	1.549.093.376	N/A	N/A	100,00	99,97	1,92	0
6.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	188.484	1.549.132	539.210	N/A	N/A	188.484	1.549.132	539.210	N/A	N/A	188.484.000	1.549.093.376	N/A	N/A	100,00	100,00	1,86	0
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	N/A	N/A	30.530	85.000	100.000	N/A	N/A	30.530	85.000	100.000	N/A	N/A	30.530.000	84.907.657	N/A	N/A	100,00	99,89	2,28	0
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	N/A	N/A	418.479	752.053	702.500	N/A	N/A	418.479	752.053	702.500	N/A	N/A	417.261.000	655.013.539	N/A	N/A	99,71	99,30	0,68	0
7.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para	N/A	N/A	171.900	125.225	126.875	N/A	N/A	171.900	125.225	126.875	N/A	N/A	171.251.000	124.825.412	N/A	N/A	99,62	99,68	-0,26	0

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
	Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																					
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	N/A	N/A	196.579	386.122	393.750	N/A	N/A	196.579	386.122	393.750	N/A	N/A	196.010.000	49.710.460	N/A	N/A	99,71	99,42	1,00	0	
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	50.000	240.706	181.875	N/A	N/A	50.000	240.706	181.875	N/A	N/A	50.000.000	75.114.952	N/A	N/A	100,00	99,85	2,64	0	
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	N/A	N/A	194.972	275.000	330.000	N/A	N/A	194.972	275.000	330.000	N/A	N/A	194.528.000	225.000.000	N/A	N/A	99,77	99,88	0,69	0	
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	N/A	N/A	140.784	225.000	305.000	N/A	N/A	140.784	225.000	305.000	N/A	N/A	140.427.000	225.000.000	N/A	N/A	99,75	99,88	1,17	0	
8.2	Pemetaan Perkiraan	N/A	N/A	54.188	50.000	25.000	N/A	N/A	54.188	50.000	25.000	N/A	N/A	54101000	49.349.002	N/A	N/A	99,84	98,70	-0,54	0	

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
	Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi																					
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	N/A	N/A	2.091.877	1.139.901	1.255.000	N/A	N/A	2.091.877	1.139.901	1.255.000	N/A	N/A	2.091.392.500	1.139.532.080	N/A	N/A	99,98	99,97	-0,40	0	
9.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	N/A	N/A	2.065.745	1.093.011	1.175.000	N/A	N/A	2.065.745	1.093.011	1.175.000	N/A	N/A	2.065.395.500	1.092.705.726	N/A	N/A	99,98	99,97	-0,43	0	
9.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	N/A	N/A	26.132	46.890	80.000	N/A	N/A	26.132	46.890	80.000	N/A	N/A	25.997.000	399.725.696	N/A	N/A	99,48	99,93	2,06	0	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	N/A	N/A	300.680	340.000	450.000	N/A	N/A	300.680	340.000	450.000	N/A	N/A	300.433.500	296.885.458	N/A	N/A	99,92	98,96	0,50	0	

No	Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
10.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	191.187	150.000	200.000	N/A	N/A	191.187	150.000	200.000	N/A	N/A	190.995.500	149.460.141	N/A	N/A	99,90	99,64	0,05	0
10.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	109.493	190.000	250.000	N/A	N/A	109.493	190.000	250.000	N/A	N/A	109.438.000	149.460.141	N/A	N/A	99,95	99,64	1,28	0

Rasio antara realisasi dan anggaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 4 program dengan 21 kegiatan dan Ex BAU terdiri dua program dengan 17 kegiatan rata-rata capaian rasio tertinggi 100 dan terendah 95,57.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tantangan

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Terbatasnya akses ekonomi bagi perempuan;
2. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
3. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
5. Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
6. Kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
7. Rendahnya implementasi pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
8. Rendahnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
9. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan di level tertentu (desa, Kecamatan);
10. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual terutama kekerasan berbasis gender online;
11. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

b. Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya Kabupaten/Kota yang menyusun pedoman Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar;

2. Bertambahnya jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tidak berKB;
3. Masih rendahnya keaktifan kader tribina dalam mendukung ketahanan keluarga
4. Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
5. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
6. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;

2. Peluang

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (Perda PUG, Perda penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dll).
2. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak (Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Rancangan Pergub Jo Kawin Bocah, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Perlindungan Anak dll).
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
6. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
7. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
8. Adanya kerjasama antar Provinsi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
9. Adanya Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Kepala OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan (SPPT-PKKTP);
10. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF.
11. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan

Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

12. Adanya kerjasama terkait perlindungan perempuan dan anak dengan unsur *pentahelix*, seperti Kerjasama Gojek dan Grab serta akademisi.
13. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
2. Adanya kebijakan terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar untuk menjadi pedoman di Daerah berupa Pergub Jateng;
3. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program KKBPK;
4. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
5. Adanya kebijakan terkait kampung KB yang menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Sekretariat;
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 2) Belum optimalnya kualitas administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.

- b. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak:
 - 1) Adanya kesenjangan gender dibidang politik dan ekonomi;
 - 2) Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG di Kabupaten/Kota;
 - 3) Belum optimalnya implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi maupun di Kabupaten/Kota;
 - 4) Belum optimalnya implementasi Kabupaten/Kota layak anak di daerah;
 - 5) Belum optimalnya implementasi pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten/Kota.

- c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak:
 - 1) Kapasitas tenaga layanan yang ada di Kabupaten/Kota belum optimal;
 - 2) Adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO);
 - 3) Masih banyaknya kekerasan yang terjadi pada institusi Pendidikan;
 - 4) Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada sarana prasarana publik;
 - 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - 6) Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

- d. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
 - 1) Belum semua Kabupaten/Kota menyusun Grand Design Pengendalian Kependudukan (GDPK) 5 Pilar;
 - 2) Belum semua kampung KB yang sudah dibentuk dapat aktif, mandiri dan berkelanjutan;
 - 3) Masih tingginya angka unmeetneed;

- 4) Masih belum optimalnya KIE KB untuk meningkatkan pemahaman masyarakat;
- 5) Kenaikan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tidak diikuti dengan naiknya Peserta KB aktif termasuk belum optimalnya penambahan pengguna KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- 6) Meningkatnya kehamilan pada usia remaja yang berdampak pada menurunnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta meningkatnya risiko stunting;
- 7) Masih tingginya angka stunting.

e. Permasalahan terkait keluarga sejahtera:

- 1) Belum optimalnya fungsi kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) dalam mendukung ketahanan keluarga;
- 2) Belum optimalnya kelompok UPPKA dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga;
- 3) Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten/Kota belum optimal;
- 4) Kurangnya kesadaran serta partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait pembangunan keluarga, KB dan Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya merencanakan kelahiran serta kehidupan berkeluarga.

Identifikasi permasalahan sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan	Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG di Provinsi maupun daerah
			Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Masih terdapat ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menjadi indikator pembangunan gender

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Masih rendahnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik</p> <p>Belum optimalnya kualitas ketersediaan data dan informasi pilah gender</p> <p>Masih rendahnya proporsi anggaran responsif gender dibanding dengan jumlah belanja operasi dan modal.</p>
2	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Pemenuhan keterisian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak hanya sebatas pemenuhan administratif.	<p>Belum optimalnya implementasi Kabupaten/Kota layak Anak</p> <p>Implementasi Pengarusutamaan hak anak belum menjadi isu prioritas dan strategis bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha</p> <p>Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan di berbagai level.</p> <p>Belum adanya sistem pelibatan anak dalam forum pengambilan keputusan secara berjenjang dan integratif</p>
4	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Semakin variatifnya kasus kekerasan terutama kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	<p>Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Belum optimalnya perlindungan bagi anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko</p> <p>Belum optimalnya sinergitas masing-masing Lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Belum semua</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kabupaten/Kota membentuk dan mempunyai layanan UPTD PPA
5	Belum optimalnya pembangunan kependudukan di daerah	Masih rendahnya Kabupaten/Kota yang menyusun dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan	<p>Belum optimalnya advokasi pemanfaatan GDPK 5 pilar di Kabupaten/Kota.</p> <p>Masih rendahnya komitmen Kabupaten/Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar</p> <p>Belum semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)</p>
6	Angka kelahiran total (TFR) Jawa Tengah masih tergolong tinggi (diatas 2,00).	Capaian Contraceptive Prevalensi rate (CPR) dan maupun KB MKJP belum optimal dibandingkan dengan peningkatan Jumlah Pasangan Usia Subur, Unmeetneed masih tinggi.	Kurangunya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB dilapangan, kurangnya motivasi dan ketrampilan Kader (PPKBD, Sub PPKBD dalam memberikan KIE), belum optimalnya dukungan mitra kerja dalam penggerakan program KB serta masih terbatasnya layanan KB gratis bagi masyarakat kurang mampu.
7	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga.	Masih rendahnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR).	Advokasi dan pendampingan terhadap kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) belum optimal
8	Belum optimalnya peran kelompok UPPKA dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Masih rendahnya kapasitas kader UPPKA dalam	Masih rendahnya pelatihan bagi kader UPPKA, terbatasnya akses sumber permodalan, kualitas produksi pemasaran dan kemasan produk hasil anggota UPPKA

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
9	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah telah memiliki peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Penyusunan peta proses bisnis tersebut merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

b. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Jawa Tengah

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan (Tahun 2024 – 2026) adalah **Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari**. Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera merupakan keberlanjutan dari tujuan pembangunan Jawa Tengah pada periode RPJMD sebelumnya dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD. Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata, dan semua masyarakat memiliki hak yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (no one left behind) agar masyarakat Jawa Tengah dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam pencapaian tujuan daerah maka sasaran daerah yang akan diwujudkan yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu: **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif.**

Sumber daya manusia Jawa Tengah yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif diharapkan mampu menjawab dinamika dan tuntutan dalam era disrupsi, globalisasi, megatrend, dan geopolitik yang tidak menentu tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Jawa Tengah. Sumber daya manusia berdaya saing dibutuhkan agar mampu berkompetisi baik pada tingkat lokal maupun global di era industry 4.0 dan society 5.0, yang diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia yang pintar, sehat, dan bugar secara inklusif. Penciptaan sumber daya manusia pintar akan dicapai dengan kualitas pendidikan yang semakin baik, melalui pemerataan akses pendidikan yang bermutu serta peningkatan partisipasi pendidikan. Disisi lain, perwujudan sumber daya manusia sehat diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, sumber daya manusia bugar lebih ditujukan pada pembentukan kebugaran masyarakat. Perwujudan sumber daya manusia pintar, sehat, dan bugar diimplementasikan secara inklusif, artinya memperhatikan kesetaraan dan pemberdayaan gender, serta kelompok rentan (miskin, difabel, ibu bayi, balita, lansia, dan remaja). Selanjutnya sumber daya manusia berkarakter dan adaptif ditunjukkan dalam bentuk sumber daya manusia Jawa Tengah yang dinamis dengan softskill yang memadai, serta memiliki critical thinking, daya juang, dan optimisme yang tinggi. Perwujudan sumber daya manusia berkarakter dan adaptif, dilakukan dengan mendorong sumber daya manusia yang memiliki literasi yang bagus, pengembangan dan peningkatan softskill yang adaptif, keterampilan yang sesuai kebutuhan jaman, serta memiliki nilai sikap perilaku berbudaya yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. **Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Keluarga.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian sasaran kedua yang diukur dengan indikator :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Target capaian sasaran dari indikator tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Daerah Tahun 2024 – 2026

Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Target Akhir
		2021	2022	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,48	92,83	93,03	93,13	93,13	93,13
Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,10	58,16	58,20	58,50	59,00	59,00

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan dan Sasaran	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	<p>Tujuan: Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif</p> <p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Pembangunan Gender ▪ Indeks Pembangunan Keluarga. 	<p>Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p> <p>Fungsi Perangkat Daerah : Perumusan, pelaksanaan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan 2. Pemenuhan keterisian indikator Kabupaten /Kota Layak Anak hanya sebatas pemenuhan administratif. 3. Semakin variatifnya kasus kekerasan terutama kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua SDM di OPD Provinsi maupun Kab/Kota memiliki kapasitas dalam melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 2. Isu Gender belum dianggap sebagai isu mainstreaming sehingga masih seringkali tidak menjadi prioritas perangkat daerah. 3. Belum optimalnya pemenuhan 7 prasyarat PUG didaerah 4. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Adanya regulasi yang mewajibkan partai politik mengajukan caleg perempuan minimal 30%. 3. Telah terbentuk jejaring kelembagaan gender dan anak sebagai mitra pemerintah dalam implementasi PUG 4. Telah diundangkan Perda dan

No	Tujuan dan Sasaran	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		<p>evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat</p>	<p>4. Masih rendahnya Kabupaten /Kota yang menyusun dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan</p> <p>5. Capaian Contraceptive Prevalensi rate (CPR) dan maupun KB MKJP belum optimal dibandingkan dengan peningkatan Jumlah Pasangan Usia Subur, Unmeetneed masih tinggi.</p> <p>6. Masih rendahnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR).</p> <p>7. Masih rendahnya kapasitas kader UPPKA dalam</p> <p>8. Belum optimalnya kualitas</p>	<p>peningkatan kesetaraan gender perlindungan perlindungan perempuan dan anak</p>	<p>Pergub tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, PUG, penyelenggaraan perlindungan perempuan.</p> <p>5. Adanya Komitmen para pengambil kebijakan di kabupaten/kota dalam pemenuhan hak anak.</p> <p>6. Adanya komitmen Kepala Daerah dan kerjasama dengan pemprov lainnya dan instansi lain dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO.</p> <p>7. Adanya perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah serta rancangan pergub terkait perlindungan anak.</p> <p>8. Tersediannya website SIGA Provinsi untuk mendukung</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			pelayanan perangkat daerah		adanya data pilah gender.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Tahun 2020 – 2024

Visi Kementerian PPPA tahun 2020-2024 yaitu: **“Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

- Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
- Peningkatan perlindungan anak; dan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyusunan tujuan Kementerian PPPA memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Kementerian PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”.



Gambar 3.1
Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Perubahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	a) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan 2. Pemenuhan keterisian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak hanya sebatas pemenuhan administratif. 3. Semakin variatifnya kasus kekerasan terutama kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 4. Masih rendahnya Kabupaten/Kota yang menyusun dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan 5. Capaian Contraceptive Prevalensi rate (CPR) dan maupun KB MKJP belum optimal dibandingkan dengan peningkatan Jumlah Pasangan Usia Subur, Unmeetneed masih tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua SDM di OPD Provinsi maupun Kab/Kota memiliki kapasitas dalam melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 2. Isu Gender belum dianggap sebagai isu mainstreaming sehingga masih seringkali tidak menjadi prioritas perangkat daerah. 3. Belum optimalnya pemenuhan 7 prasyarat PUG di daerah 4. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam peningkatan kesetaraan gender perlindungan perlindungan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Adanya regulasi yang mewajibkan partai politik mengajukan caleg perempuan minimal 30%. 3. Telah terbentuk jejaring kelembagaan gender dan anak sebagai mitra pemerintah dalam implementasi PUG 4. Telah diundangkan Perda dan Pergub tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, PUG, penyelenggaraan perlindungan perempuan. 5. Adanya Komitmen para pengambil kebijakan di kabupaten/ kota dalam pemenuhan hak anak. 6. Adanya komitmen Kepala Daerah dan kerjasama

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>6. Masih rendahnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR).</p> <p>7. Masih rendahnya kapasitas kader UPPKA dalam Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah</p>		<p>dengan pemprov lainnya dan instansi lain dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO.</p> <p>7. Adanya perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah serta rancangan pergub terkait perlindungan anak.</p> <p>8. Tersediannya website SIGA Provinsi untuk mendukung adanya data pilah gender.</p>
	b) Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak;	<p>1. Terjadinya berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum</p> <p>2. Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung.</p> <p>3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p>	<p>1. Perspektif masyarakat terkait hak anak masih rendah</p> <p>2. Anggaran untuk peningkatan SDM dan Sarpras di daerah untuk layanan perlindungan anak belum optimal</p>	<p>1. Adanya regulasi berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai daerah terkait dengan perlindungan anak.</p> <p>2. Komitmen pimpinan daerah untuk mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)</p>
	c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<p>1. Masih adanya budaya patriarki di masyarakat</p> <p>2. Belum optimalnya partisipasi</p>	Adanya komitmen unsur pentahelix untuk mendukung kesetaraan gender dan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;		masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender.	
	d) Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan 2. Rendahnya peran masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dari kekerasan 	Perspektif masyarakat terhadap hak perempuan masih rendah	Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan
	e) Meningkatnya Layanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya hak - hak anak; 2. Belum optimalnya lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 3. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti 	Perspektif masyarakat terhadap hak anak masih rendah	Dukungan dari Pemerintah dalam mewujudkan peningkatan layanan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>4. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam perlindungan anak dari kekerasan</p>		

3.3.1. Telaahan Perubahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- b. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024;
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024;
- d. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024.
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.

- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Perubahan Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.5
Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan : Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga tentram, mandiri dan bahagia Mengendalikan struktur penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan; dengansasaran :</p>	<p>Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadikewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p> <p>Fungsi Perangkat Daerah : Perumusan, pelaksanaan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman PUS tentang manfaat KB 2. Rasio PLKB dan PUS tidak proporsional (1:6) artinya 1 PLKB mendampingi 6 PUS. 3. Belum optimalnya peran kader Tribina untuk mendukung ketahanan keluarga 4. Belum optimalnya peran kader UPKKA untuk mendukung kesejahteraan keluarga 5. Masih rendahnya komitmen daerah untuk menyusun GDPK 5 Pilar 6. Masih rendahnya tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan dukungan Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan 2. Sebagian PPKBD telah terlatih untuk mendukung program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat 3. Adanya Pergub Jateng tentang GDPK 5 pilar yang mendorong Kabupaten/ Kota untuk segera

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas	Angka kelahiran total mengalami peningkatan	pendidikan perempuan sehingga mendorong pernikahan usia anak	menyusun GDPK 5 Pilar
2	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern Contraceptive Prevalence Method/mCPR</i>)	hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan	Menurunnya angka <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)		
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi	Bertambahnya persentase unmetneed		
4	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	dan edukasi	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP		
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga		Kabupaten/ Kota yang menyusun GDPK 5 pilar masih rendah		
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan		Tingginya pernikahan usia anak		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pada hakikatnya merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari.”

Dalam rangka pencapaian sasaran ke-2 Provinsi Jawa Tengah, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, berkarakter dan Adaptif, maka Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama tiga tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan;
2. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan;
3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak;
4. Meningkatkan Keluarga berkualitas;

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak;
4. Meningkatkan perlindungan khusus anak;
5. Terkendalinya jumlah penduduk;
6. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan.

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir Periode Renstra
					2021	2022	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan		Pengeluaran Perempuan PerKapita	Ribu Rupiah per orang per tahun	9.805	10.098	9.900	9.950	10.000	10.000
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%	-	30	35	35	40	40
	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan		Rasio kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000	5,11	4,38	5, 60	5,5	5,25	5,25
		Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000	8,35	4,27	4,25	4,20	4,15	4,15
	Meningkatkan perlindungan terhadap anak		IPA	Indeks	63,20	-	66	67	68	68
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	IPHA	Indeks	60,22	-	70	73	75	75

No	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2021	2022	2024	2025	2026		
		Meningkatkan perlindungan khusus anak	IPKA	Indeks	75,66	-	75	76	76,5	76,5	
3	Meningkatkan Keluarga berkualitas		% Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	-	-	2	2	2	2	
			Terkendalinya jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka	2,09	2,15	2,13	2,12	2,11	2,11
			Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	% Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%	-	-	100	100	100	100
4	Menguatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Indeks	-	93,88	73,5	74	74,5	74,5	
			Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,81	87,81	87,90	88	88,10	88,10
				Indeks Manajemen Risiko	Indeks	-	3,21	2,75	2,80	2,85	2,85

4.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/ organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah ini bertujuan mengendalikan risiko – risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Manajemen Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2024 – 2026

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, kualitas perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berkualitas	Pengeluaran Per Kapita Perempuan	Daya Beli Perempuan rendah	12	Perempuan tidak memiliki aktifitas produktif dan tidak mampu bersaing dengan laki-laki pada sektor formal maupun non formal	Tingkat kesejahteraan perempuan rendah	Mendorong perempuan untuk berwirausaha mandiri	Kepala Dinas	Tahun 2024 - 2026
	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	Banyaknya laporan kekerasan terhadap perempuan	12	- Tingkat kesadaran perempuan dan untuk melapor tinggi - Semakin banyaknya jenis kekerasan seksual (KBGO)	Tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatkan Pelayanan korban kekerasan perempuan 2. Mendorong Kerjasama lintas sektor untuk mencegah kekerasan 3. Meningkatkan efek jera bagi pelaku	Kepala Dinas	Tahun 2024 - 2026
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Implementasi Konvensi Hak Anak belum optimal	12	Pewujudan Kab/Kota Layak anak melalui lima kluster belum di implementasikan secara berkualitas dan berkelanjutan	Capaian pembangunan perlindungan anak belum sesuai yang diharapkan	1. Meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dan lingkungannya 2. Meningkatkan layanan perlindungan terhadap korban kekerasan anak	Kepala Dinas	Tahun 2024 - 2026

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						melalui pembentukan UPTD PPA 3. Meningkatkan pelayanan PUSPAGA di Kab/Kota		
	Persentase Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	Tidak terintegrasinya penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas	12	Kurangnya komitmen Stakeholder dalam pewujudan Kampung Keluarga Berkualitas berkelanjutan	Kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas belum meningkat	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan 2. Melakukan pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kepala Dinas	Tahun 2024-2026
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan Yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	Perempuan yang dilatih tidak menjadi wirausaha atau tidak mengimplementasikan hasil pelatihan	12	1. Kurangnya motivasi perempuan dalam meningkatkan ekonominya 2. Tidak adanya pendampingan pasca pelatihan	Kesejahteraan perempuan tidak meningkat	1. Meningkatkan motivasi kewirausahaan perempuan 2. Sinergitas pentahelix dan OPD Kabupaten untuk melanjutkan pendampingan pasca pelatihan.	Kepala Dinas	Tahun 2024-2026
Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan	12	- Tingkat kesadaran perempuan dan untuk melapor tinggi	Tingginya kasus kekerasan yang terjadi	1. Mengintegrasikan peran masing-masing stakeholder dalam pelayanan korban kekerasan	Kepala Dinas	Tahun 2024 - 2026

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
terhadap perempuan				Semakin banyaknya jenis kekerasan seksual (KBGO)	terhadap perempuan dan anak	2. Mendorong Kerjasama lintas sector untuk mencegah kekerasan 3. Meningkatkan efek jera bagi pelaku		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kab/Kota mengalami penurunan predikat KLA	12	Komitmen pemangku kepentingan masih kurang dalam mendukung keterisian indicator Kluster KLA	Penjaminan Pemenuhan Hak Anak di daerah yang belum optimal	Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif	Kepala Dinas	Tahun 2024 - 2026
Meningkatnya Perlindungan khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya kekerasan terhadap anak	12	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor	Meningkatnya trauma pada anak	Penguatan koordinasi, sinergi dan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan	Kepala Dinas	Tahun 2024 - 2026
Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Meningkatnya PUS yang tidak ber KB	12	1. Belum masifnya sosialisasi manfaat ber KB 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB	Meningkatnya angka kelahiran	Advokasi dan sosialisasi manfaat kepesertaan KB di masyarakat	Kepala Dinas	Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	% Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	Kurangnya pemodalan kelompok UPPKA dalam memulai usaha	12	Kurangnya dalam akses pemodalan	Peningkatkan ekonomi kelompok UPPKA tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan anggota	Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk kemudahan akses pemodalan usaha (Dinkopumkm, Balai Pelatihan, BUMD)	Kepala Dinas	Tahun 2024 - 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
3. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
5. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pengelolaan SDM dan keuangan yang profesional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan dalam melakukan setiap aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis;
2. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan;
3. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak

dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak;

4. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor;
5. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan, sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Tujuan RPD : Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari.			
Sasaran RPD : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif			
Tujuan/Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Adaptif	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui penyediaan kesempatan yang setara terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan atas sumber daya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan • Peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan • Peningkatan ketersediaan data pilah gender dan anak provinsi dan kab/kota
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Mewujudkan keluarga berkualitas melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan anti kekerasan sejak usia dini • Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor • Peningkatan kualitas penyelenggaraan Kab/Kota Layak Anak (KLA)
Meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan	Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis

Tujuan RPD : Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari.

Sasaran RPD : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif

Tujuan/Sasaran	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	
Menurunkan kekerasan terhadap perempuan	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan
Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak Meningkatkan perlindungan khusus anak	Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO	Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak
Meningkatkan Keluarga berkualitas	Terkendalinya jumlah penduduk Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor	Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor
Menguatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pengelolaan SDM dan keuangan yang profesional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala	Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi.
 - 1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - 1.3 Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Ormas kewenangan Provinsi
 - 2.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - 2.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - 1.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya lintas daerah Kab/Kota
 - 2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyedia Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - 1.1 Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 2.1 Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
 - 2.2 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

E. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
 - 1.2 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - 2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - 3.1 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - 3.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
 - 3.4 Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
 - 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi
 - 3.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - 3.4 Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
 - 3.5 Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi

G. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatana GDPK tingkat Provinsi
 - 1.3 Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - 1.4 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
 - 2.1 Sub Kegiatan Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

H. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1.1 Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
 - 1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
 - 1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - 2.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - 2.3 Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas

J. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - 1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

- 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
- 1.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.9 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan			Pengeluaran Perempuan PerKapita	Ribu Rupiah per orang per tahun		9900*		9950*		10000*		10000*		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Perempuan yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%	30	35	2.495.100.000	35	2.495.100.000	40	2.495.100.000	40	2.495.100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Persentase pemda yang mereplikasi PPEP atau Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	%		60	1.975.000. 000	65	1.975.000. 000	70	1.975.000. 000	70	1.975.000. .000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUA N	
		Pelebagaan Pangarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%		10	435.000.00 0	12	435.000.0 00	15	435.000.0 00	15	435.000.0 00		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Lapora n		4	100.000.00 0	4	100.000.0 00	4	100.000.0 00	4	100.000.0 00		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang		49	225.000.00 0	49	225.000.0 00	49	225.000.0 00	49	225.000.0 00		
		Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang		50	110.000.00 0	50	110.000.0 00	50	110.000.0 00	50	110.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%		70	1.540.000.000	75	1.540.000.000	80	1.540.000.000	80	1.540.000.000		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang		100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kelompok		6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000		
		PROGRAM PENINGKATAN	% Kab/Kota yang menyediakan	%	8.57	14.29	125.000.000	20	125.000.000	25.71	125.000.000	25.71	125.000.000	SEKSI KUALITAS	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KUALITAS KELUARGA	layanan Kualitas Keluarga Terstandar (jumlah puspaga terstandar , KPPPA)											HIDUP PEREMPUAN	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100	125.000.00 0	100	125.000.0 00	100	125.000.0 00	100	125.000.0 00		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perang kat Daerah	4	10	125.000.00 0	20	125.000.0 00	35	125.000.0 00	35	125.000.0 00		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh kab/kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Prov)	%		25	320.000.00 0	30	320.000.0 00	35	320.000.0 00	35	320.000.0 00		
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Kab/ko ta		9	320.000.00 0	12	320.000.0 00	15	320.000.0 00	15	320.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi													
		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	dokume n	6	6	320.000.00 0	6	320.000.0 00	6	320.000.0 00	6	320.000.0 00		
Menurunk an kekerasan terhadap perempua n			Rasio kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.00 0	4.38	5.6		5.5		5.25		5.25		Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatn ya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan		Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	per 100.00 0	4.27	4.25	1.485.300. 000	4.2	1.485.300. 000	4.15	1.485.300. 000	4.15	1.485.300 .000	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak, Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart	%		11	995.000.00 0	22	995.000.0 00	50	995.000.0 00	50	995.000.0 00	SEKSI PERLINDUN GAN PEREMPUA N	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%		100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%		43	180.000.000	52	180.000.000	58	180.000.000	58	180.000.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD		2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%		100	320.000.00 0	100	320.000.0 00	100	320.000.0 00	100	320.000.0 00		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	72	95	290.000.00 0	100	290.000.0 00	105	290.000.0 00	105	290.000.0 00		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan		6	30.000.000	6	30.000.00 0	6	30.000.00 0	6	30.000.00 0		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya.	lembaga	8	10	815.000.000	12	815.000.000	14	815.000.000	14	815.000.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen		3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		10	270.000.000	10	270.000.000	10	270.000.000	10	270.000.000		
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan	Orang		100	70.000.000	125	70.000.000	150	70.000.000	150	70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik												
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Antar Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/kota yang mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya		71.43	77.14	530.000.000	82.86	530.000.000	88.57	530.000.000	88.57	530.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA		5	4	450.000.00 0	4	450.000.0 00	4	450.000.0 00	4	450.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Perang kat Daerah	-	20	300.000.00 0	20	300.000.0 00	20	300.000.0 00	20	300.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	2	150.000.00 0	2	150.000.0 00	2	150.000.0 00	2	150.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE / Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kelompok		20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar		8.57	14.29	250.000.000	20	250.000.000	25.71	250.000.000	25.71	250.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak		100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000		
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam			20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatkan perlindungan terhadap anak			IPA	Indeks		66*		67*		68*		68*		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Perlindungan khusus Anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	61*	75	667.900.000	76	667.900.000	76.5	667.900.000	76.5	667.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak		IPHA	Indeks	77.77*	70	850.200.000	73	850.200.000	75	850.200.000	75	850.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.00 0		11.9	387.800.00 0	11.8	387.800.0 00	11.7	387.800.0 00	11.7	387.800.0 00	SEKSI PERLINDUN GAN ANAK	
			Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			11.9	340.000.00 0	11.8	340.000.0 00	11.7	340.000.0 00	11.7	340.000.0 00		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada anak			31.4	160x.000.0 00	34.2	160.000.0 00	37.14	160.000.0 00	37.14	160.000.0 00		
		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kebijak an		1	120.000.00 0	1	120.000.0 00	1	120.000.0 00	1	120.000.0 00		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Dokum en		1	40.000.000	1	40.000.00 0	1	40.000.00 0	1	40.000.00 0		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kewenangan Provinsi	Provinsi												
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%		100	340.000.00 0	100	340.000.0 00	100	340.000.0 00	100	340.000.0 00		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	1224	10	310.000.00 0	15	310.000.0 00	20	310.000.0 00	20	310.000.0 00		
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	35	10	30.000.000	15	30.000.00 0	20	30.000.00 0	20	30.000.00 0		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya			15	229.900.00 0	15	229.900.0 00	15	229.900.0 00	15	229.900.0 00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a													
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang		10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000		
		Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang		30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	14.950.000	1	14.950.000	1	14.950.000	1	14.950.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggun jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		khusus anak Kewenangan Provinsi													
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan		1	14.950.00 0	1	14.950.00 0	1	14.950.00 0	1	14.950.0 00		
Meningkat kan Keluarga berkualita s			Persentase Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan			2.00		2.00		2.00		2.00		Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Terkendalin ya Jumlah Penduduk		Total Fertility Rate (TFR)	Per WUS usia 15-49 tahun	2.09	2.08	1.610.000. 000	2.07	1.610.000. 000	2.06	1.610.000. 000	2.06	1.610.000 .000	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN													

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KELUARGA BERENCANA													
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR	%	65.18	65.58	1.100.000. 000	65.99	1.100.000. 000	66.4	1.100.000. 000	66.4	1.100.000. 000	SEKSI KEUARGA BERENCAN A DAN KIE	
			Unmetneed KB	%	11.63	10	80.000.000	9.95	80.000.00 0	9.9	80.000.00 0	9.9	80.000.00 0		
		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kotransepsi MKJP	juta	29.58	30.5	875.000.00 0	31	875.000.0 00	31.5	875.000.0 00	31.5	875.000.0 00		
		Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokum en	N/A	40	485.000.00 0	45	485.000.0 00	50	485.000.0 00	50	485.000.0 00		
		Pelaksanaan Advokasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan	Daerah	N/A	6	390.000.00 0	7	390.000.0 00	8	390.000.0 00	8	390.000.0 00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja												
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas.	%	N/A	10	150.000.0 00	15	150.000.0 00	20	150.000.0 00	20	150.000. 000		
		Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organis asi	3	6	150.000.00 0	7	150.000.0 00	8	150.000.0 00	8	150.000.0 00		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang			51	410.000.00 0	57	410.000.0 00	62	410.000.0 00	62	410.000.0 00	SEKSI PENGENDAL IAN PENDUDUK	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan	kab/ko ta		18	390.000.0 00	20	390.000.0 00	22	390.000.0 00	22	390.000. 000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	GDPK 5 Bidang dalam pembangunan.												
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen		1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000		
		Penyusunan dan Pemanfaatan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
		Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola	Laporan		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kelompok Kegiatan Masyarakat												
		Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kab/Ko ta		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokum en		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
		Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokum en		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%		32	665.000.00 0	34	665.000.0 00	36	665.000.0 00	36	665.000.0 00	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Per 1000 WUS 15-19 tahun		19	235.000.0 00	18.7	235.000.0 00	18.5	235.000.0 00	18.5	235.000. 000		
		Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Kab/Ko ta		3	120.000.00 0	4	120.000.0 00	5	120.000.0 00	5	120.000.0 00		
		Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK- R) di Kampung KB	Organis asi		5	70.000.000	5	70.000.00 0	5	70.000.00 0	5	70.000.00 0		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi menjadi wirausaha	%	90.5	30	475.000.0 00	30	475.000.0 00	30	475.000.0 00	30	475.000. 000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
		Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan		1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok		40	280.000.000	40	280.000.000	40	280.000.000	40	280.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab/kota		3	75.000.000	4	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
Menguatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)		93.88	73.5		74		74.5		74.5		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	79.05	87.9	15.060.185.000	88	15.060.185.000	88.1	15.060.185.000	88.1	15.060.185.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Indeks Manajemen Risiko	nilai	80	2.75	390.000.000	2.8	390.000.000	2.85	390.000.000	2.85	390.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		90	90	17.107.100.000	90	17.107.100.000	90	17.107.100.000	90	17.107.100.000	SEKRETARIAT	
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%		30	345.000.000	50	345.000.000	70	345.000.000	70	345.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%		40	345.000.00 0	50	345.000.0 00	60	345.000.0 00	60	345.000.0 00		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokum en	1	1	170.000.00 0	1	170.000.0 00	1	170.000.0 00	1	170.000.0 00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokum en	1	1	175.000.00 0	1	175.000.0 00	1	175.000.0 00	1	175.000.0 00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			1	10.676.327 .000	1	10.676.32 7.000	1	10.676.32 7.000	1	10.676.32 7.000		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	60	60	10.251.327 .000	60	10.251.32 7.000	60	10.251.32 7.000	60	10.251.32 7.000		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokum en	1	1	330.000.00 0	1	330.000.0 00	1	330.000.0 00	1	330.000.0 00		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokum en	1	1	60.000.000	1	60.000.00 0	1	60.000.00 0	1	60.000.00 0		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Dokum en		1	35.000.000	1	35.000.00 0	1	35.000.00 0	1	35.000.00 0		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			1	85.000.000	1	85.000.00 0	1	85.000.00 0	1	85.000.00 0		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en		1	80.000.000	1	80.000.00 0	1	80.000.00 0	1	80.000.00 0		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik	Lapora n		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%		90	760.000.00 0	90	760.000.0 00	90	760.000.0 00	90	760.000.0 00		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokum en		1	665.000.00 0	1	665.000.0 00	1	665.000.0 00	1	665.000.0 00		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	20	10.000.000	20	10.000.00 0	20	10.000.00 0	20	10.000.00 0		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang		25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang		50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		90	1.217.000.000	90	1.217.000.000	90	1.217.000.000	90	1.217.000.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket		10	584.000.000	10	584.000.000	10	584.000.000	10	584.000.000		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket		2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		30	170.000.000	30	170.000.000	30	170.000.000	30	170.000.000		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Laporan		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit		5	701.773.000	5	701.773.000	5	701.773.000	5	701.773.000		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket		5	191.773.000	5	191.773.000	5	191.773.000	5	191.773.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		1	2.204.000.000	1	2.204.000.000	1	2.204.000.000	1	2.204.000.000		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		1	688.000.000	1	688.000.000	1	688.000.000	1	688.000.000		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		1	1.513.000.000	1	1.513.000.000	1	1.513.000.000	1	1.513.000.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		4	1.118.000.000	4	1.118.000.000	4	1.118.000.000	4	1.118.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		1	200.000.00 0	1	200.000.0 00	1	200.000.0 00	1	200.000.0 00		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabili tasi	Unit		1	815.000.00 0	1	815.000.0 00	1	815.000.0 00	1	815.000.0 00		
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabili tasi	Unit		1	100.000.00 0	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2024	2025	2026	
1.	Pengeluaran Perempuan PerKapita	Ribu Rupiah per orang per tahun	9.805	10.098	9900*	9950*	10000*	10000*
2.	Persentase Perempuan yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%	-	30	35	35	40	40
3.	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000 perempuan dan anak	5,11	4,38	5, 60	5,5	5,25	5,25
4.	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000 perempuan dan anak	8,35	4,27	4,25	4,20	4,15	4,15
5.	IPA	Indeks	63,20	-	66*	67*	68*	68*
6.	IPHA	Indeks	60,22	-	70	73	75	75*
7.	IPKA	Indeks	75,66	-	75	76	76,5	77,77*
8.	% Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	-	-	2	2	2	2
9.	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka	2,09	2,15	2,08	2,07	2,06	2,06
10.	% Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%	-	-		100	100	100
11.	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Indeks	-	93,88	73.5	74	74.5	74.5
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,81	87,81	87,90	88	88,10	88,10
13.	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	-	3,21	2,75	2,80	2,85	2,85

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2024	2025	2026	
1.	Pengeluaran Perempuan PerKapita	Ribu Rupiah per orang per tahun	9.805	10.098	9900*	9950*	10000*	10000*
2.	Persentase Perempuan yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%	-	30	35	35	40	40
3.	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000 perempuan dan anak	5,11	4,38	5, 60	5,5	5,25	5,25
4.	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000 perempuan dan anak	8,35	4,27	4,25	4,20	4,15	4,15

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2024	2025	2026	
5.	IPA	Indeks	63,20	-	66*	67*	68*	68*
6.	IPHA	Indeks	60,22	-	70	73	75	75*
7.	IPKA	Indeks	75,66	-	75	76	76,5	77,77*
8.	% Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	-	-	2	2	2	2
9.	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka	2,09	2,15	2,08	2,07	2,06	2,06
10.	% Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%	-	-		100	100	100
11.	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Indeks	-	93,88	73.5	74	74.5	74.5
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,81	87,81	87,90	88	88,10	88,10
13.	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	-	3,21	2,75	2,80	2,85	2,85

BAB VIII PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah periode 3 (tiga) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh pegawai pada Sekretariat dan bidang-bidang Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Perubahan Renstra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan peningkatan kelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan kabupaten/kota serta dengan mengembangkan teknologi informasi;
5. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;
6. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga . melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan.